

**WANITA JAWA DALAM PENDIDIKAN KOLONIAL**  
**(Studi Sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta)**

[perpustakaan.uns.ac.id](http://perpustakaan.uns.ac.id)

[digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id)



Skripsi

Oleh:

**ARIS HIMAWAN SETIAJI**

**X 4406005**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SURAKARTA**

**2011**

**WANITA JAWA DALAM PENDIDIKAN KOLONIAL  
(Studi Sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta)**

[perpustakaan.uns.ac.id](http://perpustakaan.uns.ac.id)

[digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id)

**OLEH:  
ARIS HIMAWAN SETIAJI  
X 4406005**

**Skripsi**  
**Ditulis dan diajukan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana**  
**Pendidikan Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu**  
**Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2011**

ii

*commit to user*

**PERSETUJUAN**

perpu:

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 20 Januari 2011

Pembimbing I



Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd  
NIP. 19560303 198603 1 001

Pembimbing II



Drs. Leo Agung S., M.Pd  
NIP. 19561505 198203 1 005

**PENGESAHAN**

perpu:

]

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari : Kamis

Tanggal : 27 Januari 2011

Tim Penguji Skripsi :

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Tri Yuniyanto, M.Hum

(.....)

Sekretaris : Dra. Sri Wahyuni, M.Pd

(.....)

Penguji I : Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd

(.....)

Penguji II : Drs. Leo Agung S, M.Pd

(.....)

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd

NIP : 19600727 198702 1 001

## ABSTRAK

Aris Himawan Setiaji. **WANITA JAWA DALAM PENDIDIKAN KOLONIAL (Studi sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta)**. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Januari 2011.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : (1) Kondisi wanita Jawa pada masa Kolonial, (2) Usaha-usaha yang dilakukan oleh Adipati Mangkunegoro VII dalam memajukan pendidikan di Mangkunegaran, (3) Sistem Pendidikan Sekolah Van Deventer.

Sesuai dengan tujuan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode historis. Penelitian ini mengambil lokasi di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, dan analisis naskah-naskah kuno. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis historis yaitu teknik analisis yang mengutamakan pada ketajaman dalam melakukan interpretasi data sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) pada masa kolonial pendidikan bagi kaum wanita tidaklah dianggap penting, wanita masih dianggap sebagai golongan sub-ordinat yang tidak memiliki peranan dalam bidang apapun dan hanya berada di wilayah domestik saja. Wanita hanyalah golongan kelas dua yang berada di bawah golongan laki-laki, kedudukan wanita dianggap tidak sederajat dengan laki-laki. Dalam hal pendidikan wanita hanya memperoleh pendidikan dari lingkungan non formal atau keluarga saja, wanita dididik dan diajarkan bagai mana menjadi ibu dan istri yang harus patuh terhadap kehendak suami. (2) Mangkunegoro VII mengusahakan kemajuan dalam bidang pendidikan di wilayahnya, seperti pendidikan formal yang berupa pendirian sekolah-sekolah. Diantaranya sekolah-sekolah desa dan sekolah Siswo Mangkunegaran. Selain itu juga mengusahakan sekolah bagi kaum wanita yaitu sekolah Van Deventer. Selain pendidikan formal, Mangkunegoro VII juga menyelenggarakan pendidikan non formal yaitu melalui organisasi-organisasi pemuda dan usaha pemberantasan buta huruf. Bahkan dalam memajukan pendidikan tersebut, Mangkunegoro VII juga mengusahakan pemberian bea siswa, (3) Sekolah Van Deventer didirikan pada tahun 1927 oleh Yayasan Van Deventer fonds yang berpusat di Nederlands pada masa Mangkunegara VII, sekolah Van Deventer di tutup setelah runtuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia kemudian digantikan dengan kekuasaan Jepang. Sekolah ini merupakan sekolah milik swasta yang didirikan untuk anak-anak wanita. Dalam peyelegaraannya sekolah Van Deventer ini selain didanai langsung oleh Yayasan Van Deventer fonds juga mendapat bantuan dari Mangkunegaran. Pada masa pemerintahan praja Mangkunegoro VII sekolah Van Deventer banyak mengalami kemajuan. Sekolah ini mampu menjadi sekolah wanita favorit pada masa itu, selain mendapat perhatian kusus dari Mangkunegara VII dan istri nya sendiri, sekolah Van Deventer ini juga memiliki fasilitas dan materi pelajaran yang berbeda dibandingkan sekolah wanita yang ada di Mangkunegaran sebelumnya. Disekolah ini para wanita dididik dan dipersiapkan untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan segala tanggung jawabnya, dengan diberi bekal ilmu pengetahuan yang cukup mengenai kerumahtanggaan dan pengetahuan berbagai macam ketrampilan.

## ABSTRACT

Aris Himawan Setiaji. **WOMEN EDUCATION IN COLONIAL JAVA (A Study on Van Deventer School in Mangkunegaran Surakarta)**. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, January 2011.

The objective of research is to describe: (1) the role of Javanese woman in colonial time, (2) the attempts Adipati Mangkunegoro VII had taken to promote education in Mangkunegaran, (3) the education system of Van Deventer School.

In line with the objective above, this research employed a historical method. This research was taken place in Pura Mangkunegaran, Surakarta. The data collection was done using library study, interview and classical text analysis. Technique of analyzing data used in this research was historical analysis, that is, the one emphasizing the acuity in interpreting the historical data.

Considering the result of research, it can be concluded that: (1) in colonial time, the education for woman was not considered as important, woman was considered as a subordinate group having no role in all area but in domestic area. Woman was only the second class group under the man class, the woman position was considered as unequal to the man position. In the term of education, women only got education from informal or family environment, they were only educated and taught how to become mother and wife who was submitted to husband's desire. (2) Mangkunegoro VII attempted to promote the education in his areas, including formal education on the form of school buildings establishment such as village schools and Siswo Mangkunegaran school. In addition, he also attempted to build school for woman, Van Deventer School. In addition to formal, Mangkunegoro VII also organized the informal education through the youth organizations and the illiteracy eradication effort. Even in promoting such education, Mangkunegoro VII also granted scholarship, (3) Van Deventer school was established in 1927 by Van Deventer fonds Foundation based in Netherlands during Mangkunegoro VII reign, this school was the private-owned school established for female children. In its implementation, the school, in addition to be funded by Van Deventer fonds Foundation, also got grant from Mangkunegaran officers. During Mangkunegoro VII reign, Van Deventer closed the school once the collapse of Dutch rule in Indonesia and then replaced with Japanese power, Van Deventer school experienced considerable progresses. This school could become the favorite female school at that time, in addition to getting special attention from Mangkunegara VII and his wife, Van Deventer school also had facility and lesson material different from other preexisting female schools in Mangkunegaran. In this school the women were educated and prepared to enter the domestic life with all of its responsibilities, because they were equipped with sufficient knowledge on domestic life and many kinds of skill.

## MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak.

(QS. Al Baqarah : 216)

Tidak pernah ada kata terlambat untuk sesuatu yang lebih baik karena hidup ini terus berlanjut dan tak pernah berhenti.

(Pringg Wiji Santoso)



## PERSEMBAHAN

[perpustakaan.uns.ac.id](http://perpustakaan.uns.ac.id)

[digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id)

Karya ini dipersembahkan kepada:

- Ibu dan Bapak tercinta, terimakasih buat doa dan dukungannya.
- Adek ku Iwan Fauzi.
- Teman-teman Sejarah 2006, terimakasih atas dukungannya.
- Dian Pratiwi yang selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
- Teman-teman kos trimakasih atas motifasinya selama ini.
- Almamater



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan karuniaNya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin untuk menyusun skripsi.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah menyetujui atas permohonan skripsi ini.
3. Ketua Program Pendidikan Sejarah yang telah memberikan pengarahan dan izin atas penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Leo Agung S.,M.Pd, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua dosen Program Pendidikan Sejarah FKIP UNS.
7. Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan selama ini.
8. Bapak KRT Sumarso Ponco Sucitro yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara sekaligus penerjemah dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Basuki yang telah membantu dalam pengumpulan sumber dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh staf dan abdi dalem Pura Mangkunegaran terutama staf pegawai perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran.

11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik kepada semua pihak yang telah membantu di dalam menyelesaikan skripsi ini dengan mendapatkan berkat yang melimpah.

Penulis senantiasa menghadapi kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya.

Surakarta, Januari 2011

Penulis

Aris Himawan Setiaji



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori .....	10
1. Kolonialisme.....	10
2. Pendidikan .....	12
3. Gender.....	20
B. Kerangka Berfikir .....	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
B. Metode Penelitian .....	26
C. Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Studi Pustaka.....	29

2. Wawancara.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
F. Prosedur Penelitian .....	32

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Wanita Jawa pada masa Kolonial.....	35
B. Perkembangan Pendidikan pada masa Mangkunegara VII...	51
C. Pendidikan Wanita Van Deventer pada masa Mangkunegara VII.....	60

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	67
B. Implikasi.....	69
C. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA .....	71
----------------------	----

LAMPIRAN



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Informan.....	75
Lampiran 2	: Daftar pertanyaan.....	76
Lampiran 3	: K.G.P.AA. Mangkunegoro VII dan istrinya Gusti Kanjeng Ratu Timur .....	79
Lampiran 4	: Gusti Nurul Yang sedang menari.....	80
Lampiran 5	: Suasana kelas Van Deventer yang baru dibuka... ..	80
Lampiran 6	: Suasana Gedung dari Van Deventer School.....	81
Lampiran 7	: Murid-murid Van deventer Yang sedang belajar Membuatik	81
Lampiran 8	: Murid Van Deventer yang sedang pulang Sekolah tampak pula gapura depan sekolah.....	82
Lampiran 9	: Murid-murid Van Deventer School yang sedang belajar memasak .....	82
Lampiran 10	: Gusti Kannjeng Ratu Timur yang sedang menjarakan murid-murid Van deventer School menari di Pendopo Agung Mangkunegaran.....	83
Lampiran 11	: Berkas penyerahan murid Van Deventer Tahun 1927.....	84
Lampiran 12	: AJ.534 Daftar nama murid-murid Van Deventer Tahun 1927.....	86
Lampiran 13	: B.69 Surat dari sekretaris perhimpunan sekolah Van Deventer vereeniging kepada Mangkunegara VII.....	88
Lampiran 14	: Berkas serat macam-macam mengenai sekolah Van Deventer ...	90
Lampiran 15	: Veslag Soloche Van Deventer School.....	93
Lampiran 16	: B.70 Arsip Surat Kepada M.N bei Yosowidagdo dari Perkumpulan Van Deventer Surakarta tentang hal peminjaman ruangan kelas sekolah Sisworini.....	95
Lampiran 17	: Surat Perijinan.....	97
Lampiran 18	: Jurnal .....	102

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 1799 terjadi perubahan besar di Indonesia, yakni adanya pergantian kekuasaan dari pemerintahan VOC kepada pemerintahan Hindia Belanda yang disebabkan VOC mengalami keruntuhan akibat dari kekosongan kas negara dan hutang yang besar. Pergantian kekuasaan tersebut berlangsung dalam suasana suram akibat dari berkecambuknya perang Eropa yang melibatkan kerajaan Belanda. Pada tahun 1830-an Nederland dihadapkan pada situasi ekonomi yang genting, dengan kondisi negara diambang pintu kebangkrutan akibat keterlibatannya dalam Perang Belgia (1830-1839) maupun Perang Diponegoro (1825-1830). Untuk itu mulai dicari cara yang dianggap tepat untuk menjamin kepentingan Nederland, salah satunya adalah dengan ditetapkannya kebijakan-kebijakan di daerah koloni untuk mengisi kekosongan kas Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mengangkat Gubernur Jendral yang baru untuk Indonesia yaitu Johannes Van den Bosch (1839-1834) yang dikenal dengan sistem kebijakan Tanam Paksa (*cultuurstelsel*), kebijakan tersebut dianggap dapat mendatangkan pemasukan yang besar bagi pemerintahan Hindia Belanda.

Dengan adanya program Tanam Paksa yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda telah memaksa pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang bumi putra. Pada dasarnya sistem Tanam Paksa merupakan sistem eksploitasi dimana setiap penduduk diwajibkan menanam tanaman untuk komoditi ekspor serta harus memperkerjakan sejumlah besar orang bumi putra sebagai pegawai rendahan yang murah guna menjaga agar perkebunan pemerintah berjalan lancar. Pegawai rendahan yang dimaksud sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah memiliki kekuasaan tradisional untuk menjamin keberhasilan kekuasaan. Van Den Bosch sebagai pencipta Tanam Paksa ketika menjadi gubernur Jendral mulai dapat merasakan bahwa, tanpa bantuan penduduk bumi putra yang terdidik baik untuk administrasi pemerintahan maupun pekerja bawahan, pembangunan ekonomi di Hindia Belanda tidak akan berhasil. Untuk tujuan ini pemerintah Kolonial Belanda telah bersedia mengeluarkan sejumlah dana untuk

pendirian sekolah bagi anak bumi putra meskipun pada awalnya hanya terbatas untuk anak-anak kaum ningrat.

Sistem pendidikan bagi penduduk Indonesia mengalami perkembangan yang lebih pesat baru tampak selama zaman Liberal. Di mana pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1870 menerapkan sistem politik liberal yang membawa pengaruh dalam komposisi masyarakat Jawa, juga membawa pengaruh dalam situasi dan kondisi ekonomi bagi masyarakat Jawa. Searah dengan timbulnya perubahan di lapangan ekonomi sesudah tahun 1870, pada akhirnya turut mempercepat pengajaran dan pendidikan di Indonesia yang kemudian di teruskan pada sistem kebijakan selanjut nya. Dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan sebelum abad XX, orang Indonesia hanya mengenal pendidikan tradisional. Pendidikan itu dalam bentuk pesantren-pesantren yang biasanya dilakukan di surau-surau. Sistem pendidikan ini serupa bentuknya dengan sistem pendidikan dalam zaman Hindu dan Islam. Pada kedua sistem ini murid datang kepada guru dan tinggal bersama guru di keluarganya, dan mengerjakan pekerjaan di sawah atau ladang gurunya, ia mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru.

Kedatangan bangsa Barat di Indonesia memberikan suatu perubahan besar dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia terutama dalam bidang pendidikan, yakni kedatangan bangsa Belanda, yang hanya sebagai negara kecil di kawasan Eropa namun memiliki peranan yang besar sebagai bangsa Kolonial (Frances Gouda, 2007: 81). Dalam pertentangan itu memberikan suatu pandangan misi yang sangat mendesak kepada warga Belanda di wilayah koloni abad XX. Karena jumlah penduduk Belanda yang kecil dan kekuatan militernya yang tidak berarti di Eropa, para pejabat kolonial Belanda tidak bisa menguntungkan diri pada kekuasaan yang brutal. Sebaliknya, banyak di antara mereka yang memandang peranan utamanya dengan pengetahuan antropologi yang lebih luas, kepekaan budaya yang lebih tajam, dan keahlian politik yang lebih baik, daripada kekuasaan imperium lain di Asia. Dengan menunjukan percampuran penilaian politik yang tajam dan kebijakan budaya yang memadai dalam memerintah koloninya di Asia Tenggara, Hindia merupakan alasan utama yang menempatkan Belanda sebagai contoh” mengapa dan bagaimana

suatu bangsa kecil bisa menjadi besar”. Kekuasaan kolonial Belanda di Hindia dirancang dengan cermat (Frances Gouda, 2007:81-82).

Pada zaman VOC, Inggris dan Hindia Belanda, pendidikan untuk rakyat nusantara sangat terlantar. Setelah adanya tanam paksa (Cultuur Stelsel 1830), Belanda menjadi kaya raya, maka muncullah suatu usul dari Van Deventer tahun 1900, yang disebut ” Politik Etis ”atau politik balas jasa, yang isinya agar Belanda membalas budi kepada rakyat Indonesia dalam bentuk: Edukasi (pendidikan), Irigasi (pengairan), dan emigrasi (perpindahan penduduk) (Soedomo Hadi, 2005 : 117).

Politik Etis lahir sebagai sebuah tanggapan dari adanya sistem eksploitasi yang telah diterapkan oleh pemerintahan Belanda di Indonesia, dalam politik etis ini mengemukakan bahwa peran Belanda di Hindia, alih-alih, seyogyanya berbentuk suatu *voogdijdschap* (perwalian atau pembimbing) moral: kebijakan kolonial seharusnya terfokus pada pendidikan dan ”pengentasan” rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, dalam pidato kenegaraan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Belanda pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina yang masih muda mengemukakan ”misi moral” baru bagi para pegawai pemerintah kolonial Belanda di Hindia. Bukannya melihat tanah jajahan sebagai daerah kekuasaan dan sapi perahan yang menghasilkan keuntungan, Politik Etis mengisyaratkan sejumlah sumbangan dari pihak pemerintahan kolonial Belanda bagi pengembangan sekolah-sekolah dan pelayanan kesehatan, transportasi, dan pengembangan infrastruktur lainnya bagi penduduk pribumi (Frances Gouda, 2007: 53).

Dengan adanya perluasan bidang pendidikan di Indonesia, rakyat Indonesia berhak mengenyam pendidikan yang setara dengan orang Eropa. Kepada anak-anak bangsawan Indonesia mulai diberikan kebebasan untuk masuk ke sekolah-sekolah dasar Eropa, sehingga mereka dapat melanjutkan masuk perguruan tinggi yang ada di negeri Belanda, sedangkan untuk rakyat kecil atau golongan pribumi mulai diusahakan pendirian sekolah-sekolah desa.

Pada awal abad XX di Surakarta, khususnya di wilayah Mangkunegaran, mulai dibangun sekolah-sekolah untuk rakyat, ini juga terkait dengan politik Etis yang berkembang di Indonesia pada masa itu. Dalam kembangannya pendidikan di Mangkunegaran tidak banyak mengalami hambatan dari pemerintah Belanda,



meskipun kebijaksanaan Mangkunegaran dalam bidang pendidikan termasuk pelaksanaannya di lapangan tidak terlepas dari pengawasan pemerintah Belanda. Seperti halnya Kasunanan, maka untuk mendapatkan tenaga administratif yang sesuai dengan kehendak kerajaan, Mangkunegaran juga mendirikan sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi para abdi dalem dan sentono dalem (Sri wahyuni, [http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload\\_file/66-fullteks.doc](http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/66-fullteks.doc), 12 April 2010, 20:09).

Dalam pendiriannya sekolah-sekolah yang ada di wilayah keraton Mangkunegaran diusahakan oleh pihak istana sendiri, hal ini dikarnakan sejak berdirinya kerajaan ini memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri (*zelfbesturen*) di bawah supermasi pemerintahan kolonial Belanda. Para penguasa di Mangkunegaran memang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah Kolonial Belanda, tetapi bukan sebagai agen langsung dari pemerintah kolonial Belanda sebagai mana penguasa pribumi di daerah Gubernemen (daerah yang dikuasai Belanda secara langsung). Para penguasa di Mangkunegaran memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk dalam pembuatan keputusan demi jalan pemerintahan di Mangkunegaran, asal tidak bertentangan dengan haluan pemerintahan pusat. Dengan demikian wujud kebijaksanaan pemerintah Mangkunegaran, termasuk dalam bidang pendidikan akan berbeda dengan yang terjadi di daerah Gubernemen (Wasino, 1996:4).

Di praja Mangkunegaran pendirian sekolah-sekolah dimulai pada masa kepemimpinan Mangkunegara VI yaitu dengan didirikannya sekolah bagi laki-laki yang diberi nama sekolah Siswo Mangkunegaran, yaitu sekolah pertama milik Mangkunegaran, yang didirikan pada tahun 1912. Sekolah ini merupakan sekolah nomor satu, tetapi dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1914, sekolah ini dijadikan HIS nomor IV di Surakarta. Namun dalam perkembangannya kemajuan tingkat pendidikan di Mangkunegaran sangat terlihat pada masa kepemimpinan Mangkunegara VII. Pekerjaan lapangan pendidikan yang diselenggarakan oleh Mangkunegoro VII pada waktu silam biasa dikerjakan oleh badan-badan partikelir, lambat laun dijadikan pekerjaan resmi, sehingga dapat dengan cara-cara yang teratur, yang dapat berhubungan erat dengan tata usaha kerajaan (Amien Singgih, 1944: 1).

Bermodalkan pengalaman hidupnya sendiri, dengan disertai itikad baik untuk mengabdikan pada rakyatnya dan melanjutkan serta memelihara hal-hal yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya, disertai dengan minat yang penuh untuk segala macam persoalan yang harus dihadapi, ia dengan tekun dan teliti mengikuti perkembangan tentang segala macam hal yang terjadi dan merasa terpanggil untuk selalu ingin berbuat sesuatu agar dapat meningkatkannya terutama dalam bidang pendidikan (Bernadinnah Hilmiyah, 1985:41).

Mangkunegoro VII banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diadakan di sekolah-sekolah secara teratur, sistematis, dan mempunyai jenjang serta waktu yang telah ditentukan, sedangkan pendidikan non formal adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan secara tertib, terarah, dan berencana di luar sekolah (Zahara Idris, 1981:19).

Selain mengusahakan sekolah-sekolah bagi laki-laki, Mangkunegoro VII juga mengusahakan pendidikan bagi kaum wanita. Karena kaum wanita masih terasa sulit untuk dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki. Bagi wanita, situasinya benar-benar berbeda. Seperti yang dilansir sebuah tajuk rencana terbitan Belanda *De Taak* pada tahun 1918 dimana dikemukakan pendidikan yang belum merata pada kaum wanita Jawa. Disebutkan bahwa pendidikan para "gadis Jawa" hanya memikirkan anak-anak perempuan dari kalangan bangsawan atau priyayi bukannya gadis-gadis miskin di desa atau di kampung, yang bekerja di sawah sejak subuh hingga senja dan hanya memiliki sedikit waktu untuk menikmati indahny pendidikan (Frances Gouda, 2007:137). Imbauan idealis untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia secara umum melalui peningkatan kedudukan perempuan pribumi, memberi inspirasi dalam pendirian serangkaian lembaga pendidikan swasta. Sekolah-sekolah ini dirancang khusus untuk mendidik para gadis Jawa dan mempersiapkan mereka menghadapi tugas sebagai ibu rumah tangga dan takdir sebagai ibu. Namun kesetaraan tingkat pendidikan yang bisa didapatkan oleh wanita Jawa terhambat pada feodalisme yang mengisyaratkan seperangkat kewajiban timbal-balik, dimana jasa pekerja ditukar dengan perlindungan. Dengan adanya masyarakat feodal Jawa, pendidikan bagi anak-anak perempuan yang berasal dari kaum priyayi atau

bangsawan lebih mudah mengecap pendidikan daripada anak-anak perempuan dari kalangan bawah atau miskin (Frances Gouda, 2007:138). Sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara golongan bangsawan/priyayi dengan golongan bawah/*wong cilik*.

Salah satu faktor penghambat lainnya adalah dimana tidak meratanya pendidikan bagi wanita Jawa ketika banyak sekolah-sekolah yang mayoritas peserta didiknya anak laki-laki yang lebih besar jumlahnya dari pada anak perempuan. Hal ini disebabkan keberatan orang tua Jawa jika anak perempuan mereka satu kelas dengan anak laki-laki. Sehingga semakin sulit bagi wanita Jawa untuk dapat menikmati pendidikan (Frances Gouda, 2007:142).

Berdasarkan kondisi sosial diatas, Mangkunegoro VII memiliki keinginan untuk mencerdaskan wanita Jawa yang tidak hanya berasal dari kaum bangsawan/*Priyayi* tapi juga berasal dari golongan bawah/*wong cilik* sehingga tercapai pendidikan yang merata. Jiwa demokrat dan nasionalisme serta patriotisme masih tetap membara dalam dirinya walau telah diangkat menjadi raja. Jiwa kerakyatannya sangat terlihat karena Mangkunegoro VII telah mempelajari dan merasakan kehidupan rakyat jelata dalam masa pengembaraannya sehingga sepenuhnya dapat menghayati rasanya jadi "*wong cilik*" (Bernadinah Hilmiyah, 1985:42). Selain itu Mangkunegoro VII juga mengenyam pendidikan barat dan persahabatannya dengan teman-teman "Etisnya" dari Hindia Belanda yang memiliki misi yang sama untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan kaum pribumi terutama di Jawa. Salah satunya adalah Betsyi van Deventer-Maas memiliki hubungan yang erat dengan Mangkunegoro VII ketika mereka berkenalan pada tahun 1912 di Solo. Untuk merayakan penobatan Mangkunegoro VII menjadi raja, Betsyi mempersembahkan buku peringatan yang sangat indah sebagai kekaguman terhadap pesona tanah Jawa (Frances Gouda, 2007:174).

Perhatian Mangkunegoro VII terhadap pendidikan bagi wanita Jawa, ini terlihat dengan dibangunnya sekolah-sekolah bagi kaum wanita diantaranya adalah Sisworini dan sekolah Van Deventer. Pendirian sekolah ini didasarkan atas pertimbangan akan pentingnya kedudukan serta tanggung jawab wanita dalam rumah tangga selain itu juga dibekali ketrampilan-ketrampilan. Sekolah Sisworini sendiri

didirikan sejak kepemimpinan MangkunegoroVI dan mengalami kemajuan pada masa Mangkunegoro VII pada tahun 1923 setelah sukses dengan mendirikan sekolah Sisworini kemudian Mangkunegoro VII mendirikan sekolah Van Deventer tahun 1927 yang merupakan sekolah menengah putri milik swasta. Sekolah ini baru bisa berdiri setelah mendapat bantuan keuangan dari praja Mangkunegaran. Pelajaran yang diberikan sama seperti pada sekolah Sisworini, hanya saja ada tambahan pelajaran menyanyi, menari dan karawitan.

Kurikulum yang lengkap menjadikan sekolah ini sebagai pusat pendidikan wanita pada saat itu dan dianggap sebagai tempat persiapan bagi seorang wanita sebelum terjun ke masyarakat. Sekolah Van Deventer memang memiliki kualitas yang lebih jika dibandingkan dengan sekolah Sisworini milik Mangkunegaran. Selain kurikulumnya yang lengkap, sekolah ini juga mendapat perhatian khusus dari Mangkunegaran VII. Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada sekolah Van Deventer antara lain murid-murid di sekolah ini diperkenankan menggunakan *Pendopo Agung* Mangkunegaran dengan gamelannya untuk pelajaran menari, menyanyi dan karawitan sekali dalam seminggu. Dalam kegiatan ini seringkali Gusti Kanjeng Ratu Timur (Permaisuri Mangkunegara VII) secara langsung memberikan contoh pelajaran pada murid-murid. Empat kali dalam seminggu, murid-murid Van Deventer juga diperkenankan menggunakan kolam renang, lapangan tenis dan lapangan olah raga lainnya di dalam istana Mangkunegaran. Untuk membentuk watak ketimuran bagi wanita yang telah mendapatkan pengetahuan Barat ini, diberikan juga pelajaran mengenai etiket dan adat Jawa agar mereka tidak terasing di lingkungannya sendiri. Fasilitas-fasilitas istimewa tersebut menyebabkan sekolah ini sangat terkenal dan banyak diminati oleh para gadis dari berbagai daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat tidak terkecuali dari wilayah Surakarta sendiri (Sri wahyuni. [http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload\\_file/66-fullteks.doc](http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/66-fullteks.doc).12 April 2010.20:09).

Berawal dari eksistensi Sekolah Van Deventer yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan bagi wanita pada masa kolonial di wilayah Mangkunegaran Surakarta, penulis perlu menampilkan kehidupan wanita pada masa kolonial, bagaimana wanita khususnya di Surakarta dalam mendapatkan hak untuk mengenyam

pendidikan yang saat itu masih sulit serta adanya Sekolah Van Deventer dalam meningkatkan pendidikan bagi wanita di Surakarta. Ini merupakan kajian yang sangat menarik untuk diketahui lebih jauh sehingga timbul keinginan penulis untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam dalam rangka menyusun skripsi dengan judul : "Wanita Jawa Dalam Pendidikan Kolonial (Studi tentang sekolah Van Deventer di Mangunegaran Surakarta)".

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi wanita Jawa pada masa kolonial?
2. Bagaimana peranan Mangkunegoro VII dalam memajukan pendidikan di Mangkunegaran?
3. Bagaimana sistem pendidikan di sekolah Van Deventer?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan kondisi wanita Jawa pada masa kolonial.
2. Untuk mendiskripsikan peranan Mangkunegoro VII dalam memajukan pendidikan di Mangkunegaran.
3. Untuk mendiskripsikan sistem pendidikan sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan bagi pembaca guna mengetahui kondisi wanita Jawa pada masa kolonial.
  - b. Memberikan wawasan lebih luas kepada pembaca mengenai sistem pendidikan sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan akan ketertarikan yang lebih mendalam terhadap seluk beluk Mangkunegaran lebih luas lagi.
- c. Untuk dapat menambah koleksi penelitian ilmiah di Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah Jurusan P. IPS Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya mengenai “Peranan Sekolah Van Deventer Bagi Peningkatan Pendidikan Wanita Jawa kususnya di Surakarta.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Kolonialisme

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

##### a. Pengertian

Kata kolonialisme telah lama muncul dan dipakai diberbagai pustaka, sehingga kata kolonialisme bukan merupakan hal yang asing lagi. Roeslan Abdulgani (1984:50) mengatakan bahwa kolonialisme adalah suatu rangkaian daya dan upaya suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain. Cahyo Budi Utomo (1995:50) mengartikan kolonialisme sebagai suatu rangkaian daya upaya suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain dalam segala bidang.

Kansil dan Yulianto (1986:7) mengatakan bahwa kolonialisme merupakan rangkaian nafsu suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Menurut T.Suparman (1997:40), kolonialisme adalah nafsu suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya dengan jalan mengeksploitasi ekonomi, mendominasi politik dan mengadakan penetrasi kebudayaan.

Dari pengertian di atas maka dapat kita simpulkan, bahwa kolonialisme merupakan nafsu suatu bangsa yang merasa lebih kuat untuk menguasai dan menaklukkan bangsa atau daerah lain dalam berbagai lapisan dan segi kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Semula kolonialisme Eropa Barat datang ke Asia untuk mencari barang-barang dagangan. Kemudian mereka mulai mendesak pedagang-pedagang dari penduduk asli, setelah itu menaklukkan para bagsawan pribumi yang ada. Dengan demikian mulailah terjadi dominasi politik, dengan kekuasaan politik inilah maka cara mendapatkan keuntungan dalam perdagangan menjadi teratur dan terencana.

##### b. Bentuk-Bentuk Kolonialisme

Kolonialisme melakukan tindakan-tindakan untuk mewujudkan kepentingan di negara yang dikuasainya. Tindakan-tindakan itu meliputi dalam bidang politik,

ekonomi dan budaya yang sangat merugikan bangsa yang dijajah. kolonialisme pada dasarnya mendominasi penguasa pribumi dan menggunakannya untuk kepentingan bangsa yang menjajah. Pemerintah kolonial menjalankan “ *indirect rule*” yaitu pemerintahan tidak langsung, tetapi ia menggunakan penguasa pribumi untuk memerintah rakyat. Masyarakat pribumi dijadikan objek penguras bahan dasar bagi industrinya dan sebaliknya dijadikan pasar bagi barang-barangnya (Suhartono, 1994:7)

Bentuk pemerintahan kolonial yang ada di Indonesia dikenal dengan sistem pemerintahan tidak langsung. Artinya, penguasa kolonial tersebut dengan sadar menggunakan sistem politik tradisional setempat untuk kepentingan politik dan ekonominya sendiri di wilayah jajahan (Faruk, 2007:8). Oleh karena itu, terdapat dualisme dalam sistem kolonial di Indonesia. Di satu pihak masyarakat setempat hidup dalam dan dengan sistem politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan tradisional mereka masing-masing, tetapi di lain pihak mereka juga harus hidup dengan dan dalam tatanan kolonial yang berlaku bagi semua sektor yang ada.

Frances Gouda (2007:26), mengatakan bahwa setiap bentuk kolonialisme sesungguhnya bergantung pada proses budaya, dan hasilnya adalah suatu budaya yang mencakup lebih dari satu tujuan monopolistik untuk menyamakan atau mempertahankan cara-cara dominasi Eropa.

Menurut Cahyo Budi Utomo (1995:4), dalam sejarah perkembangan kolonialisme Indonesia terdapat beberapa bentuk kolonialisme yang pernah dipraktikkan di Indonesia. Dimulai dengan politik kolonial Portugis dan Spanyol yang ditopang dengan sistem perdagangan monopolistik, sehingga politik kolonial Portugis dan Spanyol tersebut dapat dipandang memiliki karakter konservatis (kuno), kemudian diikuti kolonial Belanda dengan praktek-praktek politiknya, yang secara garis besar mempraktekan politik konservatif dan politik kolonial modern.

### c. Akibat Kolonialisme

Pelaksanaan kolonialisme secara umum membawa suatu dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di daerah jajahan. Akibat dari kolonialisme tersebut adalah hampir semua negara-negara Asia pada abad ke 18 dan 19 kehilangan



kemerdekaannya. Disamping itu dibanding kebudayaan barat yang lama-kelamaan menggeser kebudayaan setempat.

Sistem kolonial beserta sistem eksploitasinya membawa dampak luas seperti terwujud sebagai proses komersialisasi, industrialisasi pertanian, dengan kata lain modernisasi di berbagai bidang, termasuk bidang komunikasi, transportasi dan edukasi. Suatu hasil yang tidak disengaja terjadi ialah timbulnya mobilitas sosial yang lebih tinggi serta munculnya golongan inteligensia (Sartono Kartodirdjo, 1993: ix). Selain sistem eksploitasi kolonialisme di Indonesia juga memiliki dampak yang besar yaitu berupa diskriminasi sosial yang menempatkan bangsa penjajah pada kedudukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa pribumi diskriminasi kolonial ini berlangsung dalam berbagai bidang yaitu bidang sosial, ekonomi dan politik, termasuk dalam bidang penyelenggaraan pendidikan (Cahyo Budi Utomo, 1995: 3).

Dalam segi kehidupan politik sendiri pengaruh kekuasaan kolonial berdampak pada semakin kuat nya kekuasaan Barat dan pengaruh penguasa pribumi semakin kecil yang berpengaruh pada semakin tergantungnya pada penguasa Barat atau penjajah. Kebebasan dalam menentukan kebijakan pemerintahan hilang. Sehingga dalam bidang politik ini penguasa barat memcampuri urusan pemerintahan pribumi. Tugas-tugas penguasa pribumi dibawah penguasa pemerintah Belanda dan banyak dikerahkan untuk membantu pemerintah kolonial terutama dalam menggali kekayaan bumi Indonesia (T. Suparman, 1997:35).

Dalam masyarakat kolonial khususnya di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu bangsa penjajah (Belanda) dan bangsa terjajah (Indonesia). Masyarakat kolonial dengan dua kekuatan yang berlawanan untuk kepentingan memunculkan konflik dalam berbagai segi kehidupan dalam masyarakat. Situasi kolonial tersebut merupakan tantangan bagi rakyat di daerah jajahan untuk berusaha mempertahankan diri untuk menguabah situasi yang ada.

## **2. Pendidikan**

Ada beberapa rumusan yang dikemukakan berbagai sumber dalam menguraikan arti pendidikan. Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *Paedogogouse* berdasarkan pangkal kata *Pain*, adalah pekataan yang berhubungan

dengan anak. Dalam perkembangan sejarah, sejalan dengan keadaan masyarakat dan kebudayaan, arti pendidikan berubah-ubah. Dalam arti khusus pendidikan dirumuskan sebagai bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam arti umum pendidikan diuraikan sebagai usaha yang dijalankan oleh orang atau sekelompok orang supaya mereka mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi (Sutari Iman Barnadib,1982:1). Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, meninjau pendidikan sebagai tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tertinggi.

Pada dasarnya pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu negara. Sifat pendidikan adalah kompleks, dinamis, dan kontekstual. Kompleksitas pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidikan itu adalah sebuah upaya yang serius karena pendidikan melibatkan aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan yang akan membentuk diri seseorang secara keseluruhan menjadi manusia seutuhnya (Syaiful Sagala, 2006:1). Pada dasarnya pendidikan diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai kepada ketertinggalan (Freire, 2002:12-13). Oleh karena manusia sebagai pusat pendidikan, maka manusia harus menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat (Firdaus,2004:1) Menurut prinsip *Life Long Education* yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan baru berhenti setelah orang itu meninggal dunia. Maka dari itu pendidikan tidak hanya diberikan secara formal saja di sekolah, tetapi disediakan lapangan pendidikan di luar sekolah yang merupakan pendidikan non formal (T.H.Sajid,1982:5).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perkembangan anak didik dalam kehidupan baik di masa kini atau

dimasa yang akan datang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan berlangsung dalam segala lingkungan, baik yang khusus diciptakan untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada dengan sendirinya.

a. Tujuan pendidikan

Pendidikan yang diterapkan kepada anak didik pasti mempunyai tujuan tertentu, menurut Barnadib (1983:130) disebutkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses dengan tujuan membentuk kepribadian dan pengembangan seseorang sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk keagamaan. Sedangkan menurut Redja Mulyahardjo (2002:12) mengutarakan tujuan pendidikan sebagai berikut:

Tujuan pendidikan merupakan perpaduan tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat pengembangan kemampuan pribadi secara optimal dengan tujuan-tujuan sosial yang bersifat manusia seutuhnya yang dapat memainkan peranannya sebagai warga dalam berbagai lingkungan persekutuan hidup dan kelompok sosial. Tujuan pendidikan mencakup tujuan-tujuan setiap jenis kegiatan pendidikan (bimbingan, pengajaran, dan latihan), tujuan-tujuan satuan pendidikan sekolah dan luar sekolah dan tujuan-tujuan pendidikan nasional.

Naglim Purwanto (1988:24) yang mengutip pendapat Langeveld, mengutarakan macam-macam tujuan pendidikan sebagai berikut: (1). Tujuan umum, ialah tujuan didalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau lain-lain pendidik yang telah diterapkan oleh pendidik dan selalu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat pada anak didik itu sendiri dan dihubungkan dengan syarat-syarat dan alat-alat untuk mencapai tujuan umum tersebut. (2). Tujuan-tujuan tak sempurna, ialah tujuan-tujuan mengenai segi-segi kepribadian manusia yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup tertentu, seperti keindahan, kesuilaan, keagamaan dan kemasyarakatan. (3). Tujuan-tujuan sementara, merupakan tempat-tempat pemberhentian sementara pada jalan yang menuju ketujuan umum. (4). Tujuan fundamental, tujuan ini hanya sebagai kejadian-kejadian yang merupakan saat-saat yang terlepas pada jalan yang menuju kepada tujuan umum.

Melihat batasan dan tujuan pendidikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan usaha yang bertujuan untuk

membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pribadinya secara optimal, tidak hanya sebatas latihan ketrampilan pribadi saja melainkan juga suatu pembinaan bakat dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pembinaan peran dalam berbagai lingkungan dan kelompok sosial.

b. Sistem Pendidikan Kolonial

Menurut Pamudji (1983:10) sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, di dalamnya terdapat komponen – komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu dengan yang lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Hal tersebut senada dengan pendapat Sukarna (1981:13), yang menyatakan bahwa sistem merupakan suatu yang berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan.

Pendidikan didalam paradikma kolonial hanya ditujukan demi fungsinya terhadap kebutuhan-kebutuhan pihak monopoli pemerintah kolonial, bukan demi kepentingan rakyat jajahan. Politik pendidikan kolonial erat hubungannya dengan politik kolonial yang berjalan pada umumnya, suatu politik yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahan (Nasution, 2001:20).

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah-sekolah pada umumnya mencerminkan kekuatan dan kepentingan kolonial. Pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai yang tertinggi tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang (murid) Indonesia, melainkan tidak lebih sekedar memberi kesempatan kepada keluarga atau golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta mempertahankan kelangsungan kekuasaan kolonial. Sebab itu, walaupun sistem pendidikan sedikit banyak telah memberi peluang kepada anak-anak bumi putra, sekolah-sekolah yang didirikan terutama berfungsi guna memenuhi tujuan dan kepentingan kolonial. Yang terpenting dalam hal ini ialah untuk memenuhi kekurangan tenaga pegawai pada perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan yang erat hubungannya dengan pemerintah (Mestika Zed, 1991:19).

Pengajaran pada masa kolonial Belanda sangat terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat dualistis ataupun pruralisme sosial ekonomi pada satu pihak serta diskriminasi menurut garis warna pada pihak lain. Oleh karena itu, maka pendidikan masa kolonial perlu disesuaikan dengan stratifikasi sosialnya yang bersendi pada diskriminasi dan elitis, maka perkembangan pengajaran berjalan relative sangat lambat (Sartono Kartodirdjo, 1993:77).

Sistem pendidikan masa kolonial diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan penjajah. Oleh sebab itu, sistem pendidikan yang diberikan sangatlah selektif bukan hanya diperuntukkan untuk golongan elit masyarakat Bumiputra tetapi juga untuk membatasi rakyat banyak untuk memperoleh pendidikan seluas-luasnya atau pendidikan yang lebih tinggi (HAR Tilaar. 1995:36).

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan kolonial diartikan sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain untuk menguasai dan menaklukkan bangsa lain yang meliputi berbagai segi kehidupan, antara lain segi politik, ekonomi dan penetrasi kebudayaan melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang dalam penelitian ini dilakukan oleh Belanda, dengan tujuan guna memenuhi kepentingan kolonial dalam penyediaan berbagai kebutuhan penguasa dan didasarkan pada stratifikasi dan diskriminasi.

c. Jenis-jenis pendidikan pada masa kolonial

Sebelum pemerintah Kolonial menguasai Indonesia, sejarah pendidikan di Indonesia sudah mulai. Ketika itu pendidikan pribumi hanya mengenal satu jenis pendidikan yang biasa di sebut lembaga pengajaran asli yaitu sekolah-sekolah agama Islam dalam berbagai bentuknya seperti langgar, surau atau pesantren. Disana orang dilatih mengaji al Qur'an dan mempelajari kepercayaan dan syariat agama Islam (Brugman, 1987: 76).

Pada masa pemerintahan Belanda sendiri pendidikan dimulai pada abad XX, dengan dikeluarkanya peraturan pemerintah tahun 1818 yang menetapkan bahwa orang-orang pribumi diperbolehkan masuk sekolah Belanda. pemerintah juga menetapkan peraturan-peraturan atas tata tertib yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi. Tetapi peraturan tersebut berbeda dengan kenyataan

yang ada di masyarakat bumi putra yang tidak pernah terjadi apa-apa. Hal tersebut dikarenakan terjadi keadaan darurat penghematan keuangan Kolonial Belanda untuk menghadapi peran di Jawa dan pelaksanaan Cultuur selsel yang sangat meminta perhatian. Baru pada tahun 1848 gubernur jendral telah menerima kuasa untuk membiayai pendirian sekolah-sekolah untuk kalangan orang Jawa terutama bagi pendidikan pegawai-pegawai bangsa pribumi dan baru dalam tahun 1863 diputuskan untuk melaksanakan pendidikan bagi semua anak-anak bumi putera (Brugman, 1987: 179).

Jenis-jenis pendidikan yang diselenggarakan pada masa pemerintah Belanda antara lain:

(1) Sekolah Dasar Eropa (*Europeesche Logere School* atau ELS).

*Europeesche Logere School* atau ELS pertama kali didirikan tahun 1817. Sekolah ini merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak Belanda. Sedangkan untuk anak-anak orang Indonesia yang di perbolehkan masuk hanya di ambil dari anak-anak golongan yang berpangkat tinggi saja. Pendirian sekolah ini masih terbatas di kota-kota besar saja antara lain Surabaya, Semarang, Jakarta, Yogyakarta. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Belanda (Sri Sutjiatiningsih, 1980: 59)

(2) *Holland Chinese School* (HCS).

Di Indonesia berdiri perkumpulan Cina, *Tung Hoa Hwee Kuan* pada tahun 1900 yang mula-mula mendirikan gedung pertemuan untuk menyebarkan kebiasaan dan moral Cina menurut ajaran Kong Fu Tse, perhatian mereka tertuju kepada pendidikan dengan mendirikan sekolah (Nasution, 1985:107). HCS didirikan pada tahun 1908 tujuannya adalah agar dengan bahasa Belanda dapat dikalahkan dorongan mempelajari bahasa dan kebudayaan Cina. Kurikulum HCS akan sama dengan ELS agar memberikan pendidikan Belanda yang murni kepada anak-anak Cina (Nasution, 1985:108).

(3) *Hollands Inlandse School* (HIS).

Alasan principal bagi pendirian HIS ialah keinginan yang kian menguat dikalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya

pendidikan barat (Nasution, 1985:113). Banyak orang yang merasa senang, karena ada pengharapan bagi bumiputera mencapai kepandaian yang bisa dijadikan alat untuk mencapai derajat penghidupan yang sama dengan penghidupan bangsa lain yang hidup di tanah air (Ki Hajar Dewantoro, 1977:103). HIS diresmikan pada tahun 1914 yang setara dengan Sekolah Kelas Satu, mata pelajaran terpenting adalah bahasa Belanda. Lulusan HIS relative banyak lulus dalam ujian pegawai rendah (Nasution, 1985:114-115).

(4) *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO).

Pada tahun 1903 dua kursus MULO dibuka di Bandung dan Yogyakarta sebagai sekolah rendah. Sekolah ini merupakan sekolah lanjutan dari HIS kemudian pada jaman Jepang disebut SMP. Materi yang diajarkan merupakan materi lanjutan, sekolah ini merupakan sekolah lanjutan sekolah rendah Belanda dan pada awalnya hanya boleh di kunjungi oleh anak-anak Belanda saja. Namun pada tahun 1914 sekolah ini lepas dari sekolah dasar Belanda dan berdiri sendiri. Sehingga penduduk pribumi bisa masuk kedalam sekolah ini (Sri Sutjiatiningsih, 1980:67).

(5) *Hogere Burger School* (HBS).

HBS yang semula bernama *Gymnasium* ini didirikan di Batavia pada tahun 1860. Sekolah ini setaraf dengan SMA, yang pada awalnya sekolah ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak golongan Eropa (Belanda). Namun demikian semakin lama semakin banyak orang Indonesia yang diterima di sekolah ini (H.A.R. Tilaar, 1995: 10).

(6) *Algemene Middelbare School* (AMS).

AMS secara resmi dibuka di Jakarta pada tahun 1919 merupakan sekolah yang lebih tinggi dari MULO untuk memberi kemungkinan kepada pemuda pemudi melanjutkan pengajarannya, pada jaman Jepang sekolah ini di sebut sekolah menengah tinggi dan sejak kemerdekaan disebut sebagai Sekolah menengah atas. AMS dibagi menjadi dua bagian, Bagian A materi yang diajarkan adalah Ilmu Pengetahuan Kebudayaan dan kesastraan Timur dan Klasik barat. Bagian B yang diajarkan adalah Ilmu

Pengetahuan Kealaman. Pada A1 meskipun bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda, tetapi mata pelajaran pokok bahasa Jawa, Melayu, sejarah Indonesia, Ilmu bangsa, sedang A 2 adalah mata pelajaran pokoknya bahasa Latin. A1 didirikan di Sala pada tahun 1926, A2 di Bandung pada tahun 1920 dan Bagian B di Yogyakarta pada tahun 1919 (Sri Sutjiatiningsih, 1980:67).

(7) *Volksschool* (Sekolah Desa).

Pada tahun 1907 berdiri sekolah baru, yaitu sekolah desa yang akan menyebarkan cahaya di seluruh Nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Nasution, 1985:77). Sekolah desa adalah perwujudan hasrat pemerintah untuk menyebarkan pendidikan seluas mungkin dengan biaya serendah mungkin dikalangan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekolah desa menjadi usaha pendidikan tersebar yang pernah dijalankan oleh Belanda untuk memberi kesempatan kepada rakyat banyak untuk belajar membaca, menulis dan berhitung (Nasution, 1985:87-88).

(8) *De Schoolen Der Eerst Klasse* (Sekolah Dasar Kelas Pertama).

Yaitu sekolah dasar negeri bumi putera atau sekolah Dasar Kelas I yang kemudian diubah menjadi *Hollandsche Inlansche School* (HIS), pada tahun 1915, dalam sekolah ini digunakan Bahasa Belanda yang diberikan sejak kelas 3 sampai kelas 5. Sekolah ini merupakan perubahan dari sekolah sebelumnya meskipun tidak seluruhnya demikian (Sri Sutjiatiningsih, 1980:56).

(9) *De Schoolen Der Tweede Klasse* (Sekolah Dasar Kelas Dua).

Yaitu sekolah dasar negeri bagi masyarakat bumiputera pada umumnya tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mempersiapkan ragam pegawai rendah untuk kantor pemerintah, perusahaan swasta dan mencetak guru-guru bagi sekolah-sekolah desa (Nasution, 1985:62).

(10) *Kweekschool* (Sekolah Guru)

Sekolah guru pertama kali didirikan di Surakarta kemudian di Bukit tinggi pada tahun 1856. Di Yogyakarta pada tahun 1897 yang semula bernama



*Kweekschool Voor Indilandsche Onderwijzer* atau terkenal dengan sekolah raja. Kemudian didirikan di Tanah Batu (Tapanuli) pada tahun 1864. Kemudian menyusul Ambon, Probolingga, Banjarmasin, Makassar, Padang Sidempuan (Sri Sutjiatiningsih, 1980:71).

Dalam kamus *Concise Oxford Dictionary of Current English* edisi ke-8, 1990 menyebutkan bahwa makna kata 'gender' diartikan sebagai penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau ke netralan). Sementara itu, dalam kasanah ilmu-ilmu sosial, istilah gender digunakan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi rumusan 'gender' apa bila di pandang dalam ilmu sosial lebih merujuk kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki yang merupakan bentuk sosial (perbedaan-perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan-perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin) (Mandy Macdonald,1999: xii).

Namun secara konseptual, pengertian gender lebih condong kepada seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada kedua jenis kelamin tersebut. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti: memiliki penis, memiliki jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti: rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut melekat pada manusia laki-laki dan perempuan, dan bersifat permanen. Dengan kata lain, seks adalah ciri anatomi biologi yang membedakan laki-laki dengan perempuan yang bersifat kodrati. Jadi, secara visual perbedaan seks laki-laki dan perempuan dapat dilihat secara langsung (Mansour Fakih, 1999: 7-8). Namun pada dasarnya konsep gender merupakan bentuk dari sistem ketidakadilan (gender Inequalities) baik bagi kaum laki-laki terlebih lagi bagi kaum perempuan, yang

berdampak pada dehumanisasi kaum perempuan karena ketidakadilan gender dan dehumanisasi kaum laki-laki karena melanggarkan penindasan gender.

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Nasaruddin, 1999:33). Sebagai konsep analisis, gender memiliki nilai yang besar yaitu berupa suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya: laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, sedangkan perempuan itu cantik, lemah lembut, emosional, dan keibuan (Mansour Fakih, 1999: 11-12). Gender adalah interpretasi mental dan kultur terhadap perbedaan jenis kelamin dan hubungan perempuan dan laki-laki. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat (*ideal*) bagi perempuan dan laki-laki.

Ketika seorang anak dilahirkan, maka pada saat itu sang anak sudah dapat dikenali, apakah seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan, berdasarkan alat jenis kelamin yang dimilikinya. Jika anak tersebut mempunyai alat kelamin laki-laki (*penis*) maka ia di konsepsikan sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai alat kelamin perempuan (*vagina*) maka ia di konsepsikan sebagai anak perempuan. Begitu seorang anak dilahirkan, maka pada saat yang sama ia memperoleh tugas dan beban Gender (*gender assignment*) dari lingkungan budaya masyarakat. Beban gender seseorang tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat patrilineal dan androsentris, sejak awal beban gender seorang anak laki-laki lebih dominan dibandingkan anak perempuan (Nasaruddin, 1999: 37).

Dalam perpektif budaya, setiap orang setiap orang dilahirkan dengan kategori budaya: laki-laki (baca: 'jantan') atau perempuan (baca: 'betina'). Sejak lahir setiap orang sudah ditentukan peran dan atribut gender nya masing-masing. Jika seorang bayi lahir berjenis kelamin laki-laki maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai laki-laki. Sebaliknya jika seorang lahir sebagai perempuan maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai perempuan. Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai symbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang

yang memiliki karakteristik “kejantanan” (masculinity), sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik “kewanitaan” (femininity). Perempuan dipersepsikan sebagai manusia cantik, langsing dan lembut. Sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar dan agresif. Laki-laki dianggap lebih cerdas dalam banyak hal, lebih kuat, dan lebih berani daripada perempuan. Anggapan-anggapan budaya seperti ini dengan sendirinya memberikan peran lebih luas kepada laki-laki, dan pada saatnya laki-laki memperoleh status sosial lebih tinggi daripada perempuan (Nasaruddin, 1999:74).

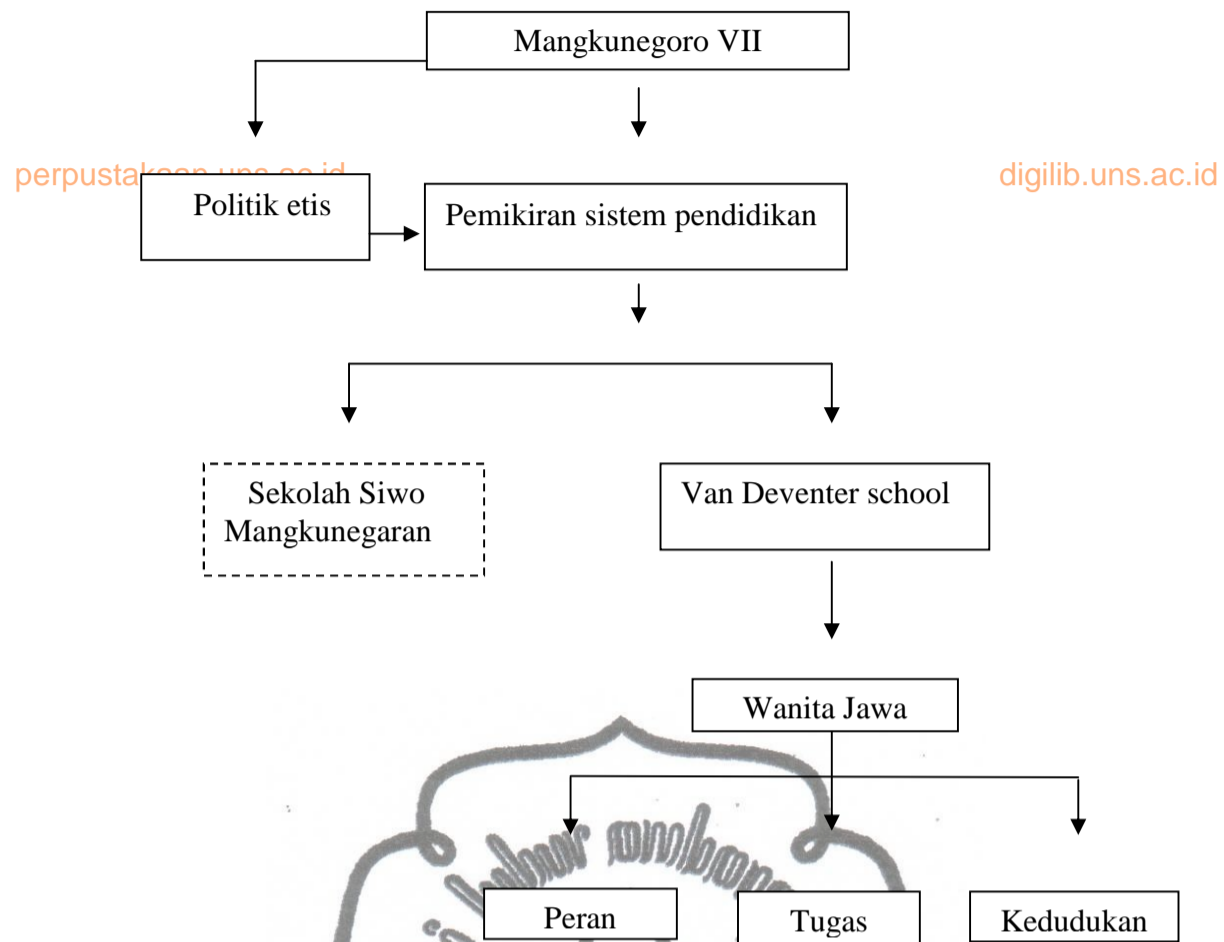
Pada umumnya dalam bidang budaya tidak terdapat definisi sosial mengenai gender atas adanya perbedaan biologis antar jenis kelamin. Namun karena dalam budaya terdapat fungsi-fungsi universal yang harus dilaksanakan seperti mengasuh anak, mencari nafkah, mengambil keputusan, mengisi peran sebagai pemimpin, maka muncul peran-peran sosial yang kemudian dikaitkan dengan gender tertentu. Meskipun hal ini tidak berarti bahwa ada fungsi tertentu yang harus dilakukan oleh perempuan atau laki-laki, tetapi kalau suatu peran sudah dikaitkan dengan salah satu gender maka peran tersebut diberi makna simbolis tertentu. Sebagai contoh, jika mengasuh anak dianggap sebagai yang perlu dilakukan oleh perempuan, maka mengasuh anak juga dapat mengembangkan keyakinan masyarakat pada umumnya bahwa menjadi ibu dan pengasuh anak-anak adalah ukuran positif tentang keperempuannya. Sehingga apa yang dianggap secara sosial lebih baik bagi salah satu gender kemudian diperkuat oleh berkembangnya sikap dan anggapan bahwa tidak pantas bagi gender lain untuk melakukan hal yang sama (Simanjuntak, 2001: 219)

Dalam hal kekuasaan, banyak pakar yang memberikan komentar terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status yang lebih tinggi dari pada perempuan. Di antara pakar tersebut ialah Dorothy Dinnerstein dan Nancy Chodorow yang mengemukakan bahwa relasi kuasa dan status ini dijadikan dasar dalam menentukan pola relasi gender. Tidak heran kalau dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan dianggap wajar didalam masyarakat. Perempuan di nilai berpenampilan dan berperilaku lemah lembut, sementara laki-laki berpenampilan dan berperilaku tegar dan jantan sehingga

memiliki kekuasaan dan status lebih besar bila dibandingkan dengan perempuan. Pola kekuasaan dan status ini sangat berpengaruh secara universal di dalam masyarakat. Tidak sedikit kebijakan dan peraturan lahir di atas persepsi tersebut (Nasaruddin, 1999:55).

Salah satu bentuk simbolisasi gender sendiri juga nampak didalam lingkungan budaya Jawa, dimana peran anak laki-laki dan anak perempuan keduanya di tuntut untuk breperilaku 'nurut' dan 'manut' (meyesuaikan dan melakukan hal-hal yang dituntut lingkungan nya ). Tetapi sikap dan perilaku ini lebih di bebaskan kepada anak perempuan karena nilai budaya Jawa yang berlaku adalah lebih baik dan pantas bagi perempuan untuk selalu mengikuti apa yang ditentukan orang lain baginya daripada mempunyai fikiran dan keinginan sendiri tentang sesuatu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam lingkungan budaya tertentu ada perbedaan sikap dalam meajarkan perilaku yang sesuai dengan gender (Simanjuntak,2001: 120). Selain itu masih melekatnya pandangan pada kultur masyarakat Jawa yang patriarki, bahwa sana perempuan masih dipandang sebagai pelengkap "konco wingking", "orang belakang", sub-ordinat bagi kaum pria. Penyebutan konco wingking tersebut bahkan disebut sebagai pengembangan dialektida budaya " adiluhung" Jawa (Suwondo, 1981: 65) perempuan hanya ditempatkan dalam posisi suwargo nunut neroko katut (segala hak dan kepentingan kaum perempuan sangat bergantung pada kaum laki-laki). Perempuan hanya dianggap sebagai obyek pelengkap pria. Budaya tersebut sangat melekat dalam masyarakat Jawa yang berdampak dalam berbagai sendi kehidupan. Perempuan pada akhirnya hanya menjadi warga kelas dua yang terbatas dan hanya berkiprah di wilayah domestik serta dalam posisi yang sub-ordinatif laki-laki.

## B. Kerangka Berpikir



### Keterangan:

Mangkunegoro VII adalah adipati yang memerintah Pura Mangkunegaran pada tahun 1916 sampai 1944. Beliau banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam berbagai bidang terutama bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan Mangkunegara VII banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Perkembangan pendidikan di Mangkunegaran sendiri tidak lepas dari politik yang pada saat itu sedang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda yang diberi nama politik etis atau politik balas budi yang salah satu programnya berupa peningkatan dalam bidang edukasi (pendidikan) bagi penduduk di wilayah Hindia Belanda termasuk Mangkunegaran Surakarta.

Dalam peningkatan Pendidikan di kawasan kraton sendiri Mangkunegara VII tidak hanya mengusahakan sekolah bagi laki-laki, tetapi juga bagi kaum wanita. Karena kaum wanita masih terasa sulit untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Sekolah wanita pertama di lingkungan Mangkunegaran adalah Sisworini yang didirikan pada masa Magkunegara VI dan kemudian dilanjutkan dengan didirikannya Van Deventer School pada masa Politik etis oleh Mangkunegara VII tahun 1927. Pendirian sekolah ini diadakan atas pertimbangan akan pentingnya kedudukan serta tanggung jawab wanita dalam rumah tangga.

Wanita diharapkan menjadi teman sekerja laki-laki dalam keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh serta mendidik anak-anak hingga tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Di sekolah ini para wanita dipersiapkan untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan segala tanggung jawabnya, dengan diberi bekal ilmu pengetahuan yang cukup, mengenai kerumahtanggaan dan pengetahuan berbagai macam ketrampilan. Sehingga wanita Jawa kusus nya dikalangan istana Mangkunegaran mengerti akan peran, tugas, serta kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi dengan judul “Wanita Jawa Dalam Pendidikan Kolonial (Studi Sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta)” menggunakan metode historis. Peneliti menggunakan studi pustaka dengan memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- d. Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran.
- e. Perpustakaan Radiyo pustoko Surakarta.
- f. Perpustakaan Daerah Kota Surakarta.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang digunakan adalah mulai dari disetujuinya judul skripsi pada bulan February 2010 dan direncanakan sampai bulan Desember 2010. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu penelitian tersebut diantaranya adalah mengumpulkan sumber, menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh dan terakhir menyusun laporan hasil penelitian.

#### **B. Metode Penelitian**

Dalam kamus *The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language* yang dikutip oleh Helius Sjamsudin yang dimaksud metode adalah suatu cara atau prosedur untuk berbuat sesuatu yang berupa keteraturan dalam berbuat dan telah terencana secara sistematis. Dengan kata lain metode berhubungan langsung

dengan suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam suatu penyelidikan tertentu untuk mendapatkan objek atau bahan-bahan yang diteliti (Helius Sjamsuddin, 2007: 13).

Dalam penelitian ilmiah peranan metode sangat penting, karena keberhasilan yang akan dicapai dalam penelitian tergantung dari pengumpulan metode yang tepat. Metode harus sesuai dengan objek yang diteliti. Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah sendiri metode merupakan bagian dari bagaimana cara untuk mengetahui dan mengungkap peristiwa sejarah dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dalam pengumpulan bahan-bahan sejarah, baik dari arsip-arsip dan perpustakaan-perpustakaan maupun dengan mewawancarai tokoh-tokoh yang masih hidup yang sehubungan dengan peristiwa bersejarah itu sehingga peneliti dapat menjangkau informasi selengkap mungkin (Helius Sjamsuddin, 2007: 15).

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau sejarah. Tujuan peneliti menggunakan metode sejarah ini adalah untuk membuat rekonstruksi tentang masa lalu yang bertema tentang “Wanita Jawa dalam pendidikan kolonial (studi sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta)” secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi serta menjelaskan dan mensintesis bukti-bukti untuk memperoleh fakta dan menarik kesimpulan secara tepat dan jelas (Moh. Nazir, 1988: 56).

### **C. Sumber Data**

Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Sutari Arikunto (1993:114) berpendapat bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sejarah atau disebut juga data sejarah.

Sumber sejarah atau data sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan penulisan sejarah. Yang dimaksud sumber sejarah dalam penelitian ini adalah bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian dan



pengkategorian. Kata “data” merupakan bentuk jamak dari kata “datum”, berasal dari bahasa latin yang berarti pemberitaan (Kuntowijoyo,1995 :54).

Menurut Sidi Gazalba (1981:88) menyebutkan bahwa sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga yaitu: (1) sumber lisan, yaitu sumber ucapan misalnya hasil wawancara; (2) sumber tulisan, yaitu catatan-catatan peristiwa atau buku-buku sejarah buku harian dan sebagainya; dan (3) sumber visual, yaitu segala sesuatu yang berupa benda-benda dan gambar bergerak.

Penelitian ini menggunakan sumber data tertulis, sumber tertulis dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari peristiwa yang lalu. Sumber primer ini bisa berupa catatan resmi, keterangan saksi mata, keputusan-keputusan rapat atau pun foto-foto. Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah berupa naskah-naskah kuno seperti majalah bahasa Belanda yang dicetak pada saat peristiwa tersebut terjadi yang berhubungan dengan tema Sekolah wanita Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta, selain majalah ada juga yang berupa *Verslag* atau laporan tahunan tentang sekolah Van Deventer Mangkunegaran. Selain sumber primer penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder. Pengertian sumber sekunder sendiri adalah sumber yang ditulis oleh seseorang yang tidak terlibat langsung atau mengalami peristiwa sejarah itu. Sumber tertulis sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang ditulis oleh orang yang tidak sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan. Dalam hal ini sumber sekunder yang di gunakan peneliti berupa buku-buku yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, antara lain; citra wanita dan Kekuasaan (Jawa) karya Budi Santoso; biografi BRM Soeryo Soeparto 1916-1944 karya Bernadiah Hilmiyah M.D; *Dutch Culture Overseas* karya Frances Gouda, dll.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode sejarah, tehnik pengumpulan data disebut heuristik. Pengumpulan data (heuristik) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam melakukan pengumpulan data digunakan tehnik studi pustaka dan wawancara. Data

dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis yang berupa buku-buku, serat-serat yang memuat tentang pendidikan pada masa kolonial yang diselenggarakan oleh Adipati Mangkunegoro VII dalam meningkatkan pendidikan wanita.

### 1. Studi Pustaka

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, yaitu memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data (Moh. Nazir, 1988: 211).

Teknik studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah dengan membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau brosur yang tersimpan dalam perpustakaan. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan kunjungan ke perpustakaan guna mendapatkan buku-buku sumber yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan, karena salah satu hal yang perlu dilakukan dalam persiapan penelitian ialah memanfaatkan dengan maksimal sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia (Koentjaraningrat, 1986: 64).

Keuntungan menggunakan studi pustaka yaitu memperdalam kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan pemikiran, memperdalam pengetahuan akan masalah yang akan diteliti, mempertajam konsep yang digunakan sehingga mempermudah dalam perumusan dan menghindari pengulangan penelitian (Koentjaraningrat, 1986: 19).

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan teknik studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data tertulis dengan membaca buku-buku literatur, majalah dan bentuk pustaka lainnya. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi mengenai sumber-sumber baik primer maupun sekunder.

Kegiatan studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber baik primer maupun sekunder yang berupa buku-buku, arsip, literatur,

maupun majalah yang berkaitan dengan tema penelitian. Kegiatan pengumpulan sumber tersebut dilakukan antara lain di berbagai perpustakaan yaitu perpustakaan Rekso pustoko Mangkunegaran Surakarta, Perpustakaan Radiyo pustoko. Perpustakaan UNS pusat, Perpustakaan FKIP, Perpustakaan Prodi Sejarah, serta Fakultas Sastra Sejarah UNS Surakarta. Kegiatan berikutnya dengan membaca, mencatat, meminjam maupun mengcopy sumber-sumber tertulis yang dianggap penting dan relevan dengan tema penelitian sehingga diperoleh data-data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (W. Gulo, 2002: 119). Menurut Moh. Nazir (1988:234) yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Dalam suatu penelitian teknik wawancara bertujuan untuk melengkapi informasi yang kurang jelas dan rincian dari bahan dokumen, sekaligus sebagai kolaborasi data. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan beberapa hal diantaranya adalah sampel responden, kriteria-kriteria responden, pewawancara serta *interview quide*.

*Interview quide* sudah harus disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dengan responden dan pewawancara harus mengerti sekali akan isi serta makna dari *interview quide* tersebut. Segala pertanyaan yang ditanyakan haruslah tidak menyimpang dari panduan yang telah digariskan dalam *interview quide* tersebut.

Dalam penelitian ini yang bertema tentang wanita Jawa dalam pendidikan kolonial (studi sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta) Wawancara atau *intervie* ditunjukkan pada pemimpin perpustakaan Rekso Pustoko, para abdi dalem dan

petugas administrasi Pura Mangkunegaran; dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya penggunaan bahasa yang tepat agar dapat menunjang pelaksanaan wawancara serta mempertimbangkan waktu saat pelaksanaan wawancara.

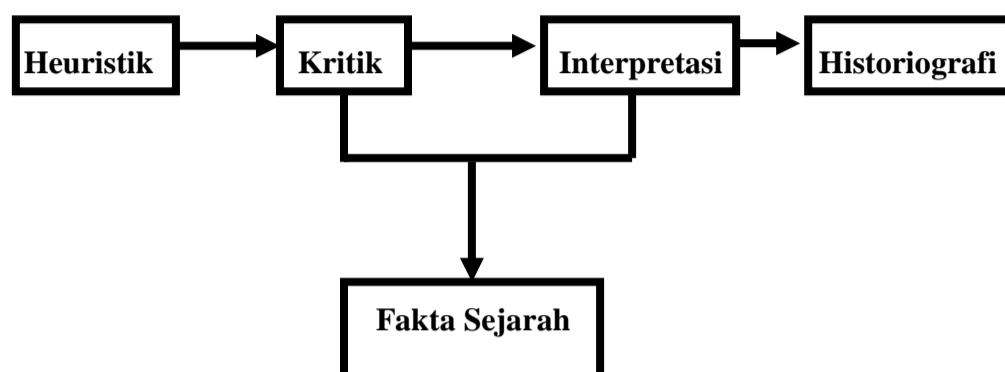
#### E. Teknik Analisis Data

Berdasar metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode historis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data historis. Teknis analisis historis merupakan analisis yang mengutamakan pada ketajaman dalam melakukan interpretasi sejarah. Interpretasi dilakukan karena fakta-fakta tidak dapat berbicara sendiri, fakta mempunyai sifat yang kompleks sehingga fakta tidak dapat dimengerti atau dilukiskan oleh fakta itu sendiri (Sartono Kartodirjo, 1992: 63).

Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data sejarah di dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan sesuai tema penelitian. Dalam menganalisis sebuah sumber diperlukan adanya kritik intern dan kritik ekstern untuk menentukan kredibilitas dan otentisitas sumber yang didapatkan. Langkah ini berguna untuk mengetahui sumber yang benar-benar diperlukan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kritik ekstern (*contruc analysis*) yaitu menganalisis fisik sumber data sejarah yang tertulis. Berbagai data tersebut digolongkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Kedua jenis sumber yang telah digolongkan tersebut diidentifikasi tentang penulis, tempat penulisan, dan tahun terbit, serta orisinalitas penulis apakah hasil penelitian ataupun editor. Dalam kegiatan selanjutnya yaitu analisis kritik intern (*content analysis*), yaitu menganalisis isi sumber data sejarah tertulis. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diseleksi atau dibandingkan satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta sejarah yang benar-benar relevan. Langkah selanjutnya adalah merangkaikan fakta-fakta tersebut, untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar peristiwa satu dengan peristiwa lainnya, kegiatan ini disebut kegiatan interpretasi. Fakta-fakta yang sudah didapatkan dan dihubungkan untuk disusun menjadi sebuah karya yang menyeluruh sesuai dengan prosedur penulisan.

## F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah dalam penelitian yang harus dijalani seorang peneliti sebelum menghasilkan sebuah penelitian yang diharapkan. Setelah mengkaji dan memilih untuk menjadikan sebagai pijakan yang tepat yaitu dengan menggunakan metode historis, maka prosedur penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut



### 1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani yang artinya memperoleh. Dalam pengertiannya yang lain adalah suatu teknik yang membantu kita untuk mencari jejak-jejak sejarah. Menurut G. J Rener (1997:37), heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum, dan sedikit mengetahui tentang bagian-bagian yang pendek.

Pada tahap ini, penulis berusaha mengumpulkan sumber atau data-data yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Kegiatan pengumpulan data, dicari data yang relevan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu berusaha mendapatkan data tertulis yang berupa buku-buku dan sumber tertulis lainnya.

Dengan demikian pada tahap ini merupakan tahap pengumpulan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu Wanita Jawa dalam pendidikan kolonial (studi sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta).

## 2. Kritik

Setelah sumber terkumpul, tahap berikutnya yaitu langkah verifikasi atau kritik guna memperoleh keabsahan sumber. Kritik sumber adalah salah satu kegiatan dalam metode sejarah, yang dilakukan untuk memilih, menyeleksi, mengidentifikasi serta menilai sumber atau data yang akan digunakan dalam penulisan sejarah kritis.

Dalam penelitian ini, kritik sumber dilakukan dengan dua cara, yaitu: [perpustakaan.uns.ac.id](http://perpustakaan.uns.ac.id) [digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id)

### a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah kritik yang meliputi apakah data itu otentik, yaitu kenyataan identitasnya, bukan tiruan, turunan, palsu, kesemuanya dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai, ejaan, tahun terbit, jabatan penulis. Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan kritik ekstern yaitu peneliti melakukan penyelidikan pada bentuk sumber, yaitu dilakukan dengan melihat tanggal, bulan, dan tahun sumber. Selain itu penulis juga memandang pengarang, pihak yang membuat dan pihak yang mengeluarkan sumber tersebut sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan apakah sumber itu dapat dipercaya atau tidak.

### b. Kritik Intern

Kritik intern adalah kritik yang berkaitan dengan isi pernyataan yang disampaikan oleh sejarawan. Kritik intern juga menyangkut apakah sumber tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Setelah sumber dinilai keasliannya kemudian dilakukan kritik intern untuk dapat memastikan kebenaran isi sumber yang dapat ditempuh dengan cara membandingkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah yang lain. Kebenaran isi dari sumber tersebut dapat dilihat dari isi pernyataan dan berita yang ditulis dari sumber yang satu dengan sumber yang lain. Hasil dari kritik sumber ialah fakta yang merupakan unsur-unsur bagi penyusunan atau rekonstruksi sejarah. Setelah dilakukan kritik maka data sejarah tersebut adalah fakta, maka langkah selanjutnya adalah melakukan intepretasi.

### 3. Interpretasi

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang menjadi obyek penelitian. Kemudian sumber tersebut ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut sesuai dengan pemikiran yang logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah atau sintesis sejarah.

### 4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam penulisan sejarah. Langkah ini merupakan kegiatan menyusun fakta sejarah menjadi suatu kisah sejarah yang menarik dan dapat dipercaya kebenarannya. Dalam menyusun historiografi diperlukan imajinasi untuk mengaitkan fakta satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang menarik dengan tema "Wanita Jawa dalam pendidikan kolonial (studi sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta)". Pada tahap ini, menyusun fakta sejarah dibutuhkan kemampuan mengungkapkan bahasa secara baik, kemampuan untuk menempatkan fakta sejarah sesuai dengan periode sejarah, kemampuan menjelaskan data yang telah ditemukan dengan menyajikan bukti-bukti dan membuat garis umum yang dapat diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Kondisi wanita Jawa pada masa Kolonial.

#### 1. Wanita Jawa dalam tradisi budaya.

Wanita Jawa adalah wanita yang dapat berbahasa Jawa, yang masih berakar dalam kebudayaan dan cara berfikir sebagaimana yang terdapat di daerah Jawa. Dalam perkembangannya gadis muda Jawa pada masa kini telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan, sebagai perempuan Jawa mereka banyak melakukan perjuangan dalam meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai golongan yang di nomor dua kan dengan golongan laki-laki. Perempuan sesungguhnya adalah lebih dari sekedar tubuh yang bukan laki-laki yang memiliki jiwa dan tidak mengenal pembedaan jenis seks. Akan tetapi dalam kebanyakan pandangan masyarakat perempuan lebih banyak didefinisikan berdasarkan kodrat jasmani (*nature*), pikiran dan hidup sehari-hari mereka, sedangkan untuk kaum laki-laki mereka lebih menjauhkan diri dari “nature” dan mulai mendefinisikan diri dalam kaidah budaya (*culture*) (Budi Santoso, 1992:10). Hal tersebut diperkuat dengan adanya pandangan dalam masyarakat bahwa kedudukan seorang istri tergantung pada suami, kedudukan anak perempuan masih tergantung pada seorang ayah atau saudara laki-lakinya.

Dari pola ketergantungan tersebut mengandung arti bahwa dalam lapisan keluarga terdapat lapisan kelompok manusia yang berkedudukan atas (laki-laki) dan bawah (wanita). Lapisan yang diatas mempunyai kesempatan” melakukan segala sesuatu” untuk menentukan atau mengatur kelompok manusia yang berada pada lapisan bawah, akibatnya lapisan bawah tergantung pada lapisan atas sebab kesempatan mengambil keputusan berada pada lapisan atas (laki-laki), sedangkan lapisan bawah menerima hasil keputusan dan melaksanakannya. Ketergantungan dari lapisan bawah ini tercipta karena ada rasa kepercayaan terhadap lapisan atas dalam mengambil keputusan, akan tetapi dapat juga terjadi karena keterpaksaan (Murniati,1992: 20).

Secara formal wanita tidak mempunyai status yang sah untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan dan mengatur kebijakan-kebijakan umum. Dalam dunia



Barat ini disebut sebagai *seksisme*, yaitu pembagian peran gender (laki-laki dan wanita) yang meyiratkan hubungan yang bersifat politis, yakni sebagai hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita. Di sini kekuasaan harus dipahami secara luas dan apstraksi yang semata-mata mengacu pada hubungan dominasi dan subordinasi. Dengan begitu, hubungan kekuasaan antara kedua jenis kelamin ini menempatkan wanita pada posisi yang subordinat, yakni sebagai pihak yang dikuasai. Hanya saja, kekuasaan laki-laki atas wanita tidak saja berdasarkan fisik belaka. Mereka memperoleh dengan persetujuan orang yang dikuasai, dalam hal ini pihak wanita sendiri, wanita secara suka rela meyetujui dan menerima kekuasaan laki-laki sebagai sesuatu yang wajar (Cristina,2008:207).

Dalam masyarakat patriarkhat Jawa, kedudukan wanita berada pada tingkatan bawah, sehingga seorang istri sering panggil dengan nama suaminya. Penyebutan nama suami ini sama sekali bukan suatu bentuk tindakan yang merendahkan wanita, melainkan suatu bentuk pengakuan pada satu prinsip bahwa suami adalah kepala keluarga. Penyebutan nama istri dengan menggunakan nama suami menjelaskan bahwa istri harus paham betul dengan kedudukan suaminya, sehingga harus bisa membawakan diri dalam menjalani kehidupan agar tidak memalukan diri dalam keluarganya. Selain itu Pada kultur Jawa yang patriarki, perempuan masih dipandang hanya sebagai pelengkap “konco wingking”, “orang belakang”, sub-ordinat“ bagi kaum pria. Penyebutan konco wingking tersebut merupakan pengembangan dialektida budaya adiluhung Jawa (Suwando, 1981: 65). Perempuan hanya ditempatkan dalam posisi *Suargo nunut neroko manut* (segala hak dan kepentingan perempuan sangat tergantung pada kepentingan laki-laki). Perempuan hanya sebagai objek pelengkap pria. Budaya tersebut sangat luas dianut dalam masyarakat Jawa sehingga mempengaruhi banyak sendi kehidupan dan pada akhirnya perempuan hanya menjadi warga kelas dua atau golongan nomor dua yang terbatas dan hanya berkiprah di wilayah domestik serta dalam posisi yang sub-ordinatif laki-laki.

Dalam kehidupan keluarga Jawa tersebut tidak terdapat kesamaan kedudukan antara suami dan istri, seorang suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan penting serta mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Sedangkan istri

bertugas sebagai pendamping atau wakil suami dalam kehidupan berumah tangga, seorang istri bertugas mengendalikan perputaran roda perekonomian keluarga sehari-hari (Heniy Astiyanto, 2006:4). Hubungan antara suami dengan istri dalam masyarakat Jawa mengenal adanya *tatakrama* atau aturan-aturan salah satu bentuk aturan tersebut adalah *sing bekti marang laki*, dinamakan bekti jika seorang istri dapat melakukan tugasnya yang baik sebagai istri dalam hal melayani dan membantu menyiapkan kebutuhan suami. Selain itu seorang istri dikatakan berbakti jika ia memenuhi nasehat, petunjuk, bahkan larangan dari suaminya. Semua itu dilakukan agar rumah tangga mereka berjalan dengan baik, sejahtera, aman dan tentram. Hal ini didasarkan atas tanggapan bahwa seorang istri biasanya mempunyai perasaan yang lebih halus daripada suami, karena sifatnya yang halus inilah akan mudah nampak janggal kalau ia tidak memenuhi tugasnya dengan baik dalam sebuah keluarga. Istilah bekti menunjukkan adanya sikap yang patuh bukan karena takut, bukan karena diancam atau dipaksa dan bukan karena tekanan siapapun akan tetapi dilakukan karena rasa cinta akan keluarga, perbuatan tersebut bukan dianggap rendah tetapi justru merupakan perbuatan yang dianggap luhur dan terhormat (Heniy Astiyanto, 2006:5-6).

Menurut kaum feodalisme aristokrasi (Para priyayi), kedudukan perempuan dalam budaya Jawa, dianggap sebagai golongan subordinasi dalam keluarga atau masyarakat, sehingga perempuan lebih pasif dan sulit untuk mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Hal tersebut lebih memihak pada pria, kedudukan pria lebih dominan sehingga perempuan (wanita) dipandang sebagai *second sex*, tidak mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan (Arifin Suryo Nugroho, 2009:12). Kedudukan perempuan sendiri hanya terbatas didalam lingkungan keluarga, seorang perempuan hanya bertugas dan bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga, seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak. Berbeda dengan golongan laki-laki, mereka lebih dibebankan pada tugas-tugas yang ada diluar rumah untuk mencari penghasilan, sehingga dalam masyarakat luas muncul suatu tanggapan bahwa laki-lakilah yang dianggap paling kuat dan pandai dibandingkan dengan wanita. Sebuah *stereotype* menyebutkan bahwa fisik perempuan lebih lemah dari laki-laki. Kaum perempuan biasa diberi predikat pasif, lemah, lembut, sabar, setia, mengalah,

emosional atau irasional atau dalam istilah Jawa wanita memiliki sifat “*narimo ing pandum*”. Sedangkan kaum laki-laki digambarkan memiliki sifat yang aktif, agresif, kuat, berani, berkuasa, dan rasional (Kris Budianto,1992 :78).

Pada abad 19 citra wanita digambarkan sebagai sosok yang menjadi suruhan utama daripada kaum pria dalam urusan rumah tangga. Wanita pada abad itu adalah makhluk yang dianggap paling bermanfaat dan serbaguna seperti halnya untuk mengangkut atau menimba air, meyalakan api untuk memasak, menyediakan makanan, menjahit pakaian, membesarkan anak, dan pada malam hari meskipun sudah sangat lelah, masih harus melayani suaminya untuk menghilangkan segala ketegangan alamiahnya. Kaum wanita pada masa itu dianggap sebagai makhluk yang tidak sederajat dengan kaum laki-laki sepanjang hidupnya, wanita harus tunduk dan patuh terhadap kekuasaan dan perintah kaum laki-laki (Hajito Notopuro,1979:32).

Pribadi wanita Jawa menurut konsep pendidikan yang terkandung dalam naskah-naskah Jawa adalah wanita Jawa yang mendukung kebudayaan Jawa. Naskah-naskah tadi berisi tentang tata cara dan sikap seorang wanita dalam menegakkan rumah tangganya agar tetap bahagia sesuai dengan adat istiadat yang berlaku (Saparinah 1982: 22). Naskah naskah yang berisi tentang pendidikan bagi kaum wanita Jawa, banyak dijumpai dalam kasanah karya sastra, yang disebut Wulang Putri dan Serat Centini, jika diungkapkan menunjukkan peran wanita di dalam rumah tangga, dengan ciri khusus wanita yang ideal dalam masyarakat Jawa pada waktu itu (Saparinah, 1982 : 27 ).

Dalam Serat Centini (Budi Santoso, 1992: 24) diambil ajaran khusus mengenai wanita yang menuturkan tentang kehidupan wanita yang digambarkan dengan “kias lima jari tangan” yang menuturkan bahwa 1) *jempol* (ibu jari), berarti “pol ing tyas” sebagai istri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami, apa saja yang menjadi kehendak harus dituruti; 2) *penuduh* (telunjuk) berarti jangan sekali-kali mematahkan petunjuk laki-laki atau “tudhuh kakung”. Petunjuk suami tidak boleh dipermasalahkan; 3) *penunggul* (jari tengah), selalu”meluhurkan” (mengunggulkan) suami dan menjaga martabat suami; 4) jari manis yang berarti harus tetap manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu; 5) *jejenthik* (kelingking) berarti istri harus selalu “athak-athikan” (terampil

dan banyak akal) dalam sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suaminya hendaknya cepat dan lembut.

Konsep wanita Jawa yang lain tertuang dalam Serat Candrarini (Budi Santoso, 1992:24) yang dirinci menjadi sembilan butir, yaitu 1) setia kepada lelaki; 2). rela dimadu; 3). mencintai suami; 4) terampil dalam pekerjaan wanita; 5) pandai berdandan dan merawat diri; 6) sederhana; 7) pandai melayani kehendak lelaki; 8) menaruh perhatian kepada mertua; 9) gemar membaca buku-buku yang berisi nasehat. Keberadaan wanita masa sekarang diungkapkan sebagai suatu realitas dalam kehidupan wanita Jawa. Digambarkan pula tentang ketergantungan wanita dan dilema yang dihadapi wanita antara tradisi yang mengikat dengan era kemajuan yang menuntut transformasi dalam kehidupan wanita Jawa.

Sebagian dari keutamaan seorang wanita dalam kaitan perannya sebagai seorang istri digambarkan sebagai berikut ini: *Gemi* adalah sikap hemat dan cermat dalam mengatur ekonomi keluarga. Seorang istri laksana sebuah *daringan* (tempat untuk menyimpan beras yang biasanya terbuat dari tanah liat). Sebagai sebuah *daringan*, seorang istri tidak boleh bocor dalam menyimpan beras karena sebagai cerminan stabilitas ekonomi keluarga yang apabila sebuah *daringan* tersebut mengeluarkan beras yang melebihi jumlah yang dimasukkan ke dalamnya, maka ekonomi keluarga akan terancam.

*Nastiti* yang berarti bersikap hati-hati, cermat dan penuh perhatian dalam mengambil setiap tindakan. Sikap ini sangat diperlukan dalam kaitannya dengan pengaturan interen rumah tangga maupun dalam kaitannya dengan hubungan sosial. *Natiti* berkaitan erat dengan sikap teratur dan waspada terhadap berbagai kemungkinan. Tanpa memiliki ini seorang istri akan menjadi teledor, dan keteledoran seorang istri jelas berbahaya bagi keutuhan rumah tangga, terutama dalam kaitannya dengan penanaman kedisiplinan kepada anak.

*Awedi* berarti sikap takut untuk melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma-norma. *Awedi* dibedakan menjadi dua yaitu: (1) *awedi mungguh Pangerane* atau takut kepada Tuhan ; dan (2) *awedi mring kakung* atau takut kepada suami. Diantara kedua hal tersebut terdapat kaitan erat yaitu apabila berdosa kepada suami sama halnya berdosa kepada Tuhan. Kaitan ini didasarkan pada keyakinan bahwa

jodoh adalah sesuatu yang telah *pinesthi*, yang bukan semata-mata karena rencana dan pilihan manusia, melainkan berdasarkan garis takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dengan demikian, sikap *awedi* ini menitikberatkan pada pengertian penghormatan dan kesetiaan seorang istri terhadap suami dan terhadap Tuhannya. Seorang istri harus mampu menjaga kehormatan dari baik dengan atau tanpa kehadiran suaminya sehingga seorang istri pantang melanggar pager ayu dan bertindak cidra (Himalayah Darmawan, 1989: 15-16).

Keutamaan seorang wanita dalam kaitan perannya sebagai seorang istri akan dapat memberikan gambaran mengenai posisi dan kedudukan wanita. Sebuah pandangan yang sudah merupakan jargon bahwa tugas wanita sepenuhnya mengabdikan kepada suami. Hal tersebut dapat dilihat dari ajaran-ajaran yang diperlukan bagi wanita sebagai berikut : 1). *Mantep*, yaitu tak berniat kepada orang lain kecuali suaminya; 2). *Temen*, maksudnya yaitu tidak palsu terhadap Sesuatu hal, tidak berdusta dalam berbicara; 3). *Nrima*, yaitu menerima dengan ikhlas apa yang telah menjadi bagiannya; 4). Sabar, artinya tidak cepat marah; 5) *Bakthi*, tidak berani kepada suami, menghormati, tidak turut campur urusan suami; 6) Gemati, artinya cekatan melayani suami; 7). *Mituhu*, artinya taat terhadap segala petunjuk suami; 8). Rumekseng laki, artinya dapat menjaga serta menyimpan rahasia suami dan tidak rela jika suaminya terkena bahaya; 9). *Weweko*, artinya kuat, sentosa dan dapat menjaga diri (Zainudin,2000: 127).

Wanita Jawa merupakan anggota masyarakat Jawa yang mendukung kebudayaan Jawa , Haryati Subadio menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai dan gagasan utama sebagai hakekat kebudayaan terwujud dalam tiga sistem budaya, secara lebih terperinci lagi yaitu sistem ideology, sistem sosial, dan sistem teknologi ( Haryati Subadio, 1985: 20). Wanita Jawa pada umumnya masih mempunyai sifat-sifat sebagaimana digambarkan dalam *stereotype* mengenai kelompoknya yaitu *nrima*, iklas, halus, sabar, dan setia (Saparinah, 1982 : 155). Sabar berarti mempunyai napas panjang dalam kesadaran bahwa pada waktu nanti nasib yang baik akan tiba. *Nrima* berarti menerima segala apa yang mendatangi kita, tanpa protes dan pemberontakan. Dalam kesulitan pun wanita diharapkan mampu bereaksi secara rasional, tidak *ambruk*, dan tidak menentang secara percuma. *Nrima* menuntut

kekuatan untuk menerima apa yang tidak dapat dielakkan tanpa membiarkan diri dihancurkan olehnya. Sikap *nrima* memberi daya tahan untuk juga menanggung nasib buruk. Iklas berarti “bersedia”. Sikap ini memuat kesediaan untuk melepaskan individualitas sendiri dan mencocokkan diri kedalam keselarasan agung alam semesta sebagaimana sudah ditentukan. Iklas dan *nrima* merupakan tanda penyerahan otonom, sebagai kemampuan untuk melepaskan sepenuh pengertian daripada membiarkan saja sesuatu direbut secara pasif. Sifat sabar, *nrima* dan ikhlas ini pun merupakan dimensi feminim dari wanita (Cristina,2008:180).

Sifat-sifat tersebut merupakan kepribadian wanita Jawa dan gambaran ideal dari wanita Jawa sehingga etika wanita Jawa dapat diwujudkan sesuai dengan nilai luhur budaya Jawa. Kepribadian wanita itu dibentuk dalam lingkungan keluarga yang telah dipengaruhi oleh sistem nilai budaya. Kepribadian wanita Jawa akan tercermin dalam sistem aslinya, yang bersifat konform atau berusaha menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku supaya dapat memenuhi harapan-harapan lingkungannya, meskipun tindakan-tindakan tersebut diperoleh dalam proses sosialisasi dan *enkulturasi* (Budi Santoso, 1992 : 57).

Mengenai peranan wanita Jawa, masyarakat Jawa pada umumnya masih menilai tinggi bahwa wanita setelah menikah sebaiknya tinggal dirumah, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak karena hal tersebut sudah merupakan kodrat bagi anak wanita yaitu menikah, melahirkan dan merawat anak-anak mereka (Budi Santoso, 1992: 57). Sebagian masyarakat Jawa menganggap bahwa pendidikan bukan merupakan prioritas utama bagi wanita bahkan tidak perlu sama sekali.

## 2. Wanita Jawa dalam perkembangan pendidikan kolonial.

Seperti yang kita ketahui bersama pendidikan merupakan suatu yang penting dalam perkembangan sebuah negara dimana tingkat kemakmuran dan perkembangan negara tersebut dapat kita ketahui dari seberapa pesat kemajuan tingkat pendidikan dan tingkat perekonomian yang di serap oleh masarakat dalam negara tersebut. Pendidikan digunakan sebagai sarana soasialisasi merupakan kegiatan manusia yang melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga usia pendidikan hampir sama tua nya

dengan usia manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbagai rentang peradaban. Perjalanan panjang perkembangan pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan dapat di telusuri sejak zaman Hindu dan Budha pada abad ke-5. Dari perkembangan sejak masa itu, dapat kita peroleh gambaran bahwa pendidikan telah berlangsung sesuai dengan tuntutan zaman yang berbeda-beda dengan peyesuaian pada ediologi, tujuan serta sistem peyampiannya.

Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha, pendidikan dipengaruhi oleh ajaran agama tersebut sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada saat itu. Demikian juga pada zaman permulaan masuk dan berkembangnya agama Islam, pendidikan dan pengajaran dilaksanakan dalam rangka penyebaran agama Islam, yang berbentuk surau, langgar atau pesantren. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan pendidikan dan pengajaran Islam mulai berpengaruh terhadap tumbuhnya pusat-pusat kekuasaan Islam di daerah pesisir sebagai pusat-pusat kekuasaan baru yang secara perlahan-lahan mengatikan pusat kekuasaan Hindu dan Budha di pedalama (Brugmans, 1987:176).

Pada zaman penjajahan, sistem pendidikan di tanah air lebih bayak di sesuaikan dengan kepentingan penjajah dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Pemerintah kolonial secara sistematis memasukan paham mereka dengan menanamkan superioritas budaya barat melalui pendidikan sekolah rakyat kepada pribumi (Wardiman Djojonegoro, 1996: 1). Pada saat pemerintaha kolonial berlangsung di Indonesia, pendidikan dijalankan oleh golongan *Aufklarung* atau *Enlightenment* yang menaruh kepercayaan akan pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan (Nasution, 2001:8). Akan tetapi pengajaran yang dilakukan oleh golongan *Aufklarung* dikawasan Hindia Belanda tersebut hanya diperuntukan untuk golongan Eropa dan kalangan penganut agama Kristen, dengan tujuan supaya mereka dapat membaca kitab Injil. Kondisi tersebut mulai sedikit berubah pada pertengahan abad 19 dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tahun 1818 yang menetapkan bahwa orang-orang pribumi diperbolehkan masuk kedalam sekolah-sekolah Belanda dan pemerintah akan menetapkan peraturan-peraturan tata tertip yang diperuntukan mengenai sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi. Tetapi kebijakan yang telah dikelaurkan oleh pemerintah Belanda tersebut hanya berupa ucapan kosong saja.

Keadaan darurat untuk penghematan, perang Jawa dan *Cultuur stelsel* sangat meyita perhatian pemerintah Hindia Belanda (Brugman, 1987: 179).

Ide-ide libeal yang diterapkan bagi anak-anak Belanda dengan menyediakan fasilitas pendidikan secukupnya, tidak dilaksanakan bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda hanya bertanggung jawab untuk membuat peraturan tanpa berkewajiban menyediakan sekolah bagi kalangan bumi putra. Sejak tahun 1816 ketika pulau Jawa kembali lagi dikuasai oleh Belanda, segera nampak bahwa peraturan pemerintah tentang sekolah dan penyelenggaraannya lebih di fokuskan kepada pendidikan untuk kalangan orang-orang Belanda saja. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan tahun 1818, sama sekali tidak meyingung mengenai pendidikan untuk anak Pribumi (Wardiman Djoyonegoro, 1996:15). Dalam perkembangannya baru pada tahun 1820 Gubernur Jendral Van der Capellen (1819-1825) menganjurkan untuk dilaksanakannya pendidikan rakyat berdasarkan masyarakat desa, regen-regen diinstrusikan untuk menyediakan sekolah bagi penduduk dan mengajar anak-anak pribumi membaca, menulis dan mengenal budi pekerti yang baik, seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya tahun 1808 oleh Dendels yaitu regen-regen bagian utara dan timur Jawa diminta untuk mendirikan sekolah dengan menggunakan biaya sendiri. Namun Anjuran Gubernur Jendral tersebut gagal untuk mengembangkan pendidikan, baru pada tahun 1849 terdapat dua sekolah yang didirikan oleh regen-regen yang masih aktif (Nasution, 2001:10).

Kesulitan keuangan menyebabkan raja Belanda untuk meninggalkan prinsip-prinsip liberal dan lebih mementingkan anjuran dari Van den Bosch bekas Gubernur Jendral Guyana untuk menjalankan politik eksploitasi yang sedang berjalan di kawasan kolonial Hindia Belanda. Pendidikan bagi kalangan bumi putra baru menapat sedikit titik terang pada tahun 1865 pada saat pemerintahan di pegang oleh kaum liberal yang mempunyai pendidikan lebih luas. Pada tahun 1865 menteri tanah jajahan Fansen Van de Putte berhasil mempercepat pendidikan dengan pembangunan sekolah dan menghapus batas biaya f 25.000,- menjadi f 400.000,- pada tahun 1863, sehingga pada tahun 1864, terdapat 183 sekolah bagi kalangan Pribumi (Brugman, 1987: 179). Usaha-usaha Fansen Van de Putte tersebut kemudian mulai menurun kembali pada tahun 1870 dengan terpuruknya sistem perekonomian yang ada akibat



dari perang dan jatuhnya harga gula yang menjadi salah satu komoditi ekspor di kawasan Eropa. Sehingga pemerintah Hindia Belanda sepakat menyerahkan pendidikan ketangan swasta untuk meringankan pemerintah dari beban financial. Ditangan kalangan swasta pendidikan hanya difokuskan bagi anak aristokasi dan golongan orang kaya atau ningrat sedangkan untuk golongan rakyat jelata masih belum perlu untuk dilaksanakan, besarnya ngaran yang diperlukan menjadi salah satu faktor penghambat bagi terlaksanakannya pendidikan bagi kalangan bawah (Nasution, 2001: 15).

Baru pada tahun 1899 muncul sebuah kritikan yang ditulis oleh Van Deventer yang berjudul hutang kehormatan dalam majalah *De Gids*. Dimana Van Deventer dengan sengit mencerca politik pemerintah Belanda yang lama, yang tanpa belaskasihan sedikit pun telah merampok jutaan dari kekayaan Hindia Belanda dimasa lalu, dan ia menuntut restitusi dari surplus yang telah diambil oleh pemerintah Belanda terhitung sejak berlakunya *Comptabiliteitswet* pada tahun 1867 (Suryanto Sastroatmodjo, 2005:105). Disitu dengan jelas Van Deventer megemukakan bahwa keuntungan yang selama ini diperoleh dari kawasan Hindia Belanda hendaknya dibayar kembali dari pebendaharaan Belanda yang selama ini banyak diperoleh dari hasil tanah jajahan. Dari tulisan Van Deventer itulah di negeri Belanda mulai muncul Pro dan kontra dalam peyelenggaraan kesejahteraan di kalangan pribumi. Kritikan dalam majalah *De Gids* tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari pemerintah Belanda, pada tahun 1901 buah pikiran itu mengema dalam pidato raja Belanda, Ratu Wilhelmina yang baru dinobatkan menjadi Ratu *Nederland* pada usia 18 tahun mengeluarkan tanggapan atas nasib di Indonesia tersebut:

“sebagai Negara Kristen, Nederland berkewajiban di kepulauan Hindia Belanda untuk lebih baik mengatur kedudukan legal penduduk pribumi, memberika batuan pada dasar yan tegas kepada misi Kristen , serta meresapi keseluruhan tindak laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Nederland mempuyai kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu, kesejahteraan rakyat Jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus. Kami mengiginkan diadakannya penelitian tentang sebab-musababnya” (Nasution, 2001 :15).

Dari tanggapan ratu Belanda tersebut dipandang sebagai ekspresi ide yang baru yang kemudian dikenal sebagai *Politik Etis*. Pendirian ini menentang politik eksploitasi materialistis pada masa silam dan harus mengatikan sikap *laissez faire*

liberalisme dengan mengadakan intervensi pemerintah dalam urusan ekonomi. Dalam politik etis yang dijalankan oleh kolonial Belanda, Van Deventer menganjurkan tiga program yang dianggap dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Tiga program tersebut meliputi perbaikan dalam bidang Irigasi agar meningkatkan produksi pertanian, mengadakan transmigrasi dari daerah-daerah yang terlampau padat penduduknya, yang terakhir adalah peningkatan dalam bidang pendidikan (edukasi). Dari tiga program yang dijalankan oleh pemerintah Belanda tersebut hanya bidang edukasi (pendidikan) yang dianggap paling berperan dalam peningkatan kesejahteraan di kawasan Hindia Belanda, sedangkan program transmigrasi (emigrasi) dan irigasi dipandang lebih menguntungkan dan memihak bangsa Belanda dari pada pribumi.

Program Emigrasi dan irigasi hanyalah sebuah kedok nama untuk mengelabui rakyat jelata dan bangsawan pribumi saat itu, seolah-olah ingin membalas budi baiknya rakyat Hindia Belanda, namun dalam pelaksanaannya rakyat harus membayar mahal setiap program-program penguasa (irigasi-emigrasi). Dalam program emigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, rakyat diwajibkan untuk berpindah tempat tinggal, ini ditunjukan untuk mencari lahan-lahan baru dalam bidang pertanian, sedangkan hasil dari pertanian tersebut harus berbagi hasil dengan penguasa Belanda dan tuan tanah. Untuk program irigasi sendiri, dalam pelaksanaannya pemerintah Belanda seakan-akan membantu rakyat untuk mengairi tanah pertanian mereka. Rakyat Hindia Belanda dipaksa bekerja untuk pembuatan saluran air yang kokoh, namun setelah saluran air tersebut jadi dan ladang, sawah-sawah milik rakyat mendapat pengairan dan masa panen tiba, lagi-lagi rakyat harus membagi hasil pertanian mereka dengan cara membayar pajak-pajak hasil pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda.

Walaupun demikian pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi) sangat berperan bagi kemajuan rakyat Hindia Belanda. Dalam perkembangan pendidikan yang dilaksanakan pada masa politik etis tersebut telah banyak menghasilkan sekolah-sekolah Eropa yang diperuntukan bagi golongan bumi putra yang didirikan secara bertahap seperti HIS (*Hollandsch-Inlandsche Scholen*; sekolah-sekolah Belanda pribumi) yang didirikan pada tahun 1914. Sekolah ini

merupakan perubahan dari sekolah kelas satu (*Eerste School*) yang diperuntukan bagi golongan atas (Ricklefs, 1994: 239). Selain HIS ada juga MULO (*Meer Untgebreid Lager Onderwijs* : pendidikan rendah yang setara dengan SLTP), AMS (*Algemeene Middelbare School*) dan HBS (*Hoogere Burger School* : sekolah Menengah Tingkat atas) sekolah-sekolah di atas merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda untuk masyarakat atau pribumi golongan atas, sedangkan untuk sekolah-sekolah bagi golongan bawah pemerintah Belanda membuka sekolah Kelas dua (*Tweede School*).

Sekolah dasar kelas satu didirikan di wilayah ibukota karesidenan, kabupaten, kawedanan atau yang sederajat, dan di kota-kota yang menjadi pusat perdagangan. Dalam pendiriannya sekolah dasar kelas satu ditunjukan untuk lapisan atas masyarakat pribumi, yaitu golongan bangsawan dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan dan perusahaan atau perkebunan. Sedangkan sekolah dasar kelas dua (ongko loro) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat umum. Perbedaan antara sekolah dasar kelas satu dan sekolah dasar kelas dua terletak pada mata pelajaran, kurikulum, tenaga pengajar, dan uang sekolah. Sedangkan untuk bahasa pengantar yang digunakan, pada awalnya yang digunakan di sekolah kelas satu adalah bahasa Melayu dan daerah, akan tetapi setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah tanggal 7 september 1915, Stb.No.23 sekolah dasar kelas satu bahasa pengantarnya di ubah menjadi bahasa Belanda (Wardiman Djoyonegoro, 1996:19).

Menurut M.C. Ricklefs (1994:240) bahwa dalam pembaharuan sekolah-sekolah Kelas Satu dan pengembangan-pengembangan pendidikan selanjutnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan rakyat Indonesia golongan bawah, yang telah diberikesempatan memasuki sekolah-sekolah kelas Dua. Memperluas pendidikan untuk rakyat banyak merupakan suatu masalah keungan yang luar biasa, pada tahun 1918 diperkirakan pemerintah Hindia Belanda akan menghabiskan biaya sebesar 417 juta gulden setahun guna mengurus sekolah-sekolah Kelas dua bagi seluruh penduduk Indonesia, biaya ini dianggap lebih besar daripada seluruh pengeluaran pemerintah kolonial.

Demi mengurangi pengeluaran biaya yang besar bagi kas kolonial tersebut maka pada tahun 1904 Van Heutsz membuka sekolah-sekolah desa (*volkscholen*: sekolah rakyat) yang dalam pembiayaannya ditanggung oleh penduduk desa sendiri, tetapi dengan bantuan pemerintah kalau perlu. Seperti halnya dengan banyak perbaikan etnis lainnya, pemerintah menetapkan apa yang dianggap terbaik untuk rakyat pribumi dan sesudah itu memberitahukan berapa yang harus dibayar oleh rakyat itu demi perbaikan mereka. Di sekolah-sekolah desa tersebut akan diterapkan masa pendidikan selama tiga tahun dan materi pembelajaran yang diberikan berupa ketrampilan dasar membaca, berhitung dan ketrampilan praktis, yang diajarkan dalam bahasa daerah (Ricklefs, 1994: 240).

Sebagian besar sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Belanda tersebut mayoritas diperuntukan bagi anak laki-laki, jarang sekali terdapat anak perempuan yang bersekolah kecuali anak priyayi dan bangsawan. Kesempatan bersekolah bagi perempuan pribumi semakin kecil karena sekolah-sekolah di Hindia Belanda khususnya Jawa dimaksudkan untuk mendidik pegawai-pegawai pemerintahan. Konsekuensinya adalah yang pertama hanya anak laki-laki yang diterima dan kedua, anak priyayi diberikan prioritas utama. Maka anak-anak perempuan mengalami berbagai rintangan dalam mengikuti pendidikan formal. Hal ini diperkuat dengan adanya larangan bagi kaum wanita untuk ikut aktif dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh kalangan pemeluk agama Islam dan penduduk dari kalangan ortodoks, yang sangat berkeberatan terhadap diadakannya sekolah bagi murid wanita (Brugmans, 1987:180). Selain dari kalangan agama Islam dan ortodoks larangan bagi pendidikan bagi wanita juga muncul dari adat istiadat tradisional yang ada di kalangan masyarakat setempat. Penduduk sendiri tidak melihat adanya manfaat gadis-gadis yang dididik dengan cara yang sama seperti anak pria. Mereka menganggap gadis-gadis hanya memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga dan sawah sehingga tidak memerlukan pendidikan yang formal (Nasution, 2001:47). Halangan-halangan sosial tersebut masih terlampau kuat untuk mengizinkan anak wanita menikmati pendidikan yang sama seperti anak laki-laki. Disamping itu semua sekolah menggunakan model pembauran jenis kelamin, namun anak perempuan lebih jarang

hadir karena keberatan para orang tua Jawa jika anak perempuan mereka satu kelas dengan anak laki-laki (Frances Gouda, 1995:142).

Pada umumnya para orang tua masih bersikap konservatif dan masih kolot. Para orang tua tidak bersedia memikul biaya pendidikan untuk anak perempuannya seperti yang disediakan untuk pendidikan anak laki-laki. Anak perempuan hanya memperoleh pendidikan dari lingkungan keluarga sebatas untuk persiapan tugas hidupnya yaitu, sebagai seorang ibu dan seorang istri. Adanya adat istiadat yang mengikat disertai dengan norma-norma sosial sangat mengekang kehidupan kaum wanita. Dalam tradisi feodal masyarakat Indonesia, wanita tidak berani menentang kebijaksanaan atau peraturan yang dikeluarkan kaum laki-laki. Jika ada kaum wanita yang berani menentang kebijaksanaan tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat yang berupa cerlaan atau cemoohan.

Dari kalangan masyarakat kolonial Belanda sendiri juga muncul sebuah konsensus yang tak resmi akan kedudukan wanita, mereka lebih menempatkan wanita, terutama sebagai lambang “tradisi”, karena secara alami wanita menjalani kehidupan di dalam sebuah ritual keluarga, pekerjaan, dan agama mereka sehari-hari. Perempuan cenderung merupakan penengah antara inovasi dan tradisi, selain itu wanita juga menjadi penengah antara dorongan yang berorientasi masa depan, dan mempertahankan tradisi yang masih dipegang pada masa lampau. Pandangan ini muncul dan dipegang kuat dalam masyarakat Jawa golongan atas yang berbudi halus (Frances Gouda, 1995:145).

Mereka berpendapat bahwa gadis-gadis Jawa harus tetap alami dan tidak tercemar oleh nilai-nilai Eropa, terkecuali anak-anak perempuan priyayi yang tidak lagi diperlakukan sebagai pion dalam permainan catur perkawinan, yang sepenuhnya dirancang untuk melanjutkan kepentingan ayah mereka dalam meningkatkan status dan gengsi keluarga. Akan tetapi pada tahun 1900-an sedikit demi sedikit pandangan mengenai perempuan Jawa mulai berubah, himbuan idealis untuk meningkatkan derajat (*apheffing*) bangsa Indonesia khususnya golongan wanita mulai mengalami peningkatan, kedudukan wanita pribumi khususnya di kawasan Jawa, memberi inspirasi dalam pendirian serangkaian lembaga pendidikan swasta (Frances Gouda, 1995:137).

Peningkata pendidikan bagi kalangan wanita bumi putra kususny di daerah Jawa tersebut tidak lepas dari perjuangan seorang Raden Anjeng Kartini (1879-1904), putri bupati Jepara dari selirnya, Ngasirah. Kartini lahir sebagai sebagai anak perempuan priyayi Jawa terkemuka yang berbudi halus dan berpengetahuan luas, yang kemudian menimbulkan dampak yang sulit diabaikan terhadap definisi kolonial mengenai perempuan terpelajar didalam pengertian kesadaran diri modern. Dari kumpulan surat-surat kartini yang dikirimkan kepada sahabatnya Rosa Manuel Abendanon-Mandiri istri mantan direktur pendidikan, Agama dan Industri Hindia Belanda, Kartini mengungkapkan secara jelas dan terbuka tentang diskriminasi yang dialami kaum perempuan dalam masyarakat Jawa tradisional. Ia meratapi buta huruf yang ada di kalangan perempuan Jawa pada masa itu, karena tidak tersedianya peluang pendidikan bagi para gadis; ia juga mencela praktik poligami dan kawin paksa yang kerap kali memerdaya perempuan Jawa yang baru menginjak usia belasan tahun. "kami, gadis-gadis Jawa, tidak boleh memiliki cita-cita", demikian tulisan nya dengan getir, menuntut Kartini perempuan Jawa hanya boleh mempunyai satu impian, dan itu adalah dipaksa menikah hari ini atau besok dengan pria yang dianggap patut oleh orang tua mereka (Frances Gouda, 1995:148-152).

Dari tulisan-tulisan tersebut dapat kita simpulkan bahwa bagi Kartini tradisi di Jawa lebih menyiratkan segala sesuatunya untuk laki-laki dan tak ada satupun untuk perempuan termasuk dalam bidang pendidikan. Kedudukan wanita Jawa lebih menekankan pada urusan rumah tangga, bagi wanita Jawa rumah tangga dapat dianggap sebagai pusat segala-galanya. Adat dan kebiasaan tersebut merupakan salah satu penghambat wanita memperoleh pendidikan sehingga tidak salah jika R. A Kartini memperjuangkan nasib wanita supaya wanita tidak dianggap hanya sekedar *konco wingking* saja yang hanya mengurus rumah tangga dan tidak perlu menikmati pendidikan yang tinggi sama halnya seperti apa yang didapatkan oleh laki-laki.

Kartini hadir sebagai perwujudan semua tujuan moderenitas yang ingin dicapai oleh pendidik Belanda. Kematian nya yang terlalu cepat tidak meyurutkan perjuangannya dalam meningkatkan pendidikan bagi golongan wanita Jawa. Dari Tulisan-tulisan Kartini yang diterbitkan di Belanda dengan judul *Door duisternis tot licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang). Dengan segera kumpulan tulisan tersebut

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

meraih sukses besar dikalangan publik pembaca Belanda. Royalti buku tersebut, bersama dengan sumbangan pribadi dan subsidi pemerintah mendanai berdirinya Yayasan Kartini pada tahun 1913, yang kemudian pada tahun 1916 telah membuka tujuh sekolah swasta di Semarang (1913), Batavia (1914), Madiun (1914), Bogor (1914), Malang (1915), Cirebon (1916), dan Pekalongan yang khusus memberi pendidikan dasar kepada anak-anak perempuan bangsawan pribumi. Sebagai kelanjutan logis, Yayasan Van Deventer, didirikan pada tahun 1917, menyelenggarakan sekolah berasrama di Semarang dan Solo untuk pendidikan lanjutan (*voortgezet*) bagi gadis-gadis Indonesia guna melatih perempuan Jawa sebagai guru sekolah dan sebagai istri yang trampil dalam kehidupan rumah tangga (Frances Gouda, 1995:151-153).

Selain membuka sekolah kepada anak-anak perempuan bangsawan pribumi, Yayasan Kartini juga membuka tiga sekolah *istri*, atau sekolah pribumi kelas dua untuk para gadis di Bogor (1924), Batavia (1927), dan Jatinegara (1928). Dengan menyamakan kurikulum sekolah pribumi kelas dua yang didukung pemerintah, meski dilengkapi dengan kursus-kursus pengetahuan ekonomi rumah tangga yang dirancang untuk mempersiapkan gadis-gadis pribumi dalam tugasnya dimasa depan sebagai ibu rumah tangga. Sekolah *istri* dengan cepat mampu menarik perhatian murid perempuan dalam jumlah yang besar (Frances Gouda, 1995:153-154).

Pelopop penggerak pendidikan bagi wanita Jawa khususnya, Kartini mampu meningkatkan peranan dan kedudukan wanita lebih layak dalam kehidupan melalui pendidikan. Semangat dan pemikiran Kartini sangat berpengaruh dan banyak memberikan motivasi bagi kaum wanita, bahwasanya mereka pantas disejajarkan dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan dan tidak dipungkiri melalui perjuangannya, Kartini memberikan inspirasi kepada para penerus untuk melanjutkan perjuangannya dalam meningkatkan pendidikan bagi Bangsa Indonesia terutama kaum perempuan di Jawa.

## **B . Perkembangan pendidikan pada masa Mangkunegara VII**

Mangkunegaran adalah merupakan salah satu dari empat daerah swapraja di Jawa Tengah, munculnya Mangkunegaran sebagai daerah swapraja, diawali dengan

adanya campur tangan Belanda di dalam urusan dalam negeri Mataram pada pertengahan abad XVIII. Sampai pada akhirnya dikeluarkanlah perjanjian Gianti tahun 1755 yang berisi terpecahnya Mataram menjadi dua bagian yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dua tahun setelah itu Belanda mengeluarkan lagi perjanjian Salatiga tahun 1757 yang berisi pemecahan kerajaan Surakarta menjadi dua bagian yaitu Kasunanan dibawah Sunan Pakubuwana III dan Mangkunegaran dibawah Raden Mas Said yang kemudian memakai gelar Mangkunegara I. dengan pembagian tersebut Mangkunegara mendapat hak atas tanah sebesar 4000 karya, pada perkembangan selanjutnya tanah tersebut mulai bertambah besar, hal itu terjadi karena Mangkunegaran banyak berjasa terhadap pemerintahan Belanda, atas jasa-jasanya tersebut Belanda selalu memberikan imbalan berupa tanah kepada pemerintahan Mangkunegaran.

Dalam perkembangannya, sejak pemerintahan Mangkunegara I (1757-1795) sampai dengan 1916, Mangkunegaran telah mengalami 6 kali pergantian kekuasaan, yang berarti 7 orang adipati pernah memerintah di Mangkunegaran. Dalam pelaksanaan pergantian kekuasaan atau tahta, Mangkunegaran sudah lebih moderat bila dibandingkan dengan daerah-daerah swaparaja yang lain. Dengan tetap memperhatikan adat yang berlaku sistem pergantian tahta di Mangkunegaran sedikit banyak telah mencerminkan suatu bentuk kedaulatan rakyat, meskipun secara tidak langsung. Karena pergantian tahta di Mangkunegaran tidak lagi didasarkan atas urutan keturunan, yang berarti hanya putra tertua raja dari permaisuri saja yang berhak mengantikan raja sebagai kepala pemerintahan, tetapi mulai mempertimbangkan pula kecakapan serta kemampuan seseorang sebagai calon penganti raja. Jadi di Mangkunegaran bisa jadi anak menantu atau keponakan raja yang menduduki tahta Mangkunegaran, apabila dirasakan memiliki kemampuan untuk memimpin rakyat (Suara Merdeka, 17 Maret 1989).

Demikian pula yang terjadi pada Mangkunegara VII, ia menerima tahta dari Mangkunegara VI, ayah angkatnya. Pergantian tahta ini terjadi setelah mangkunegara VI berhasil memulihkan kembali kondisi keuangan kadipaten mangkunegaran yang pada masa pemerintahan sebelumnya pernah mengalami krisis dan kemudian menjadikannya salah satu kadipaten yang cukup kaya. Beberapa tahun setelah



keberhasilannya, Mangkunegara VI bermaksud untuk turun tahta, dan ia menyatakan keinginannya tersebut kepada Residen Belanda di Surakarta, hal tersebut dikarnakan terjadinya pergantian tahta di daerah swaparaja saat itu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Belanda. Sebagai pengantinya Mangkunegara VI Residen Belanda menunjuk Raden Mas Sueryo Soeparto putra dari selir mangkunegara V.

Sebelum menjadi Raja di kadipaten Mangkunegaran dia adalah putra ketiga dari Mangkunegara V (1881-1896), yang lahir pada tanggal 12 Desember 1885, dengan nama Raden Mas Ario Suryo Suparto, walaupun berkelahiran bangsawan tinggi masa awalnya ditandai dengan masa perjuangan melawan kemalangan, pada usia 11 tahun ayahnya wafat dan ia jatuh dibawah kekuasaan pamannya yang eksentrik, Mangkunegara VI, dengan siapa ia berkonflik karena ingin mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Ia lulus dari sekolah dasar gaya Barat tujuh tahun ketika berusia 16 tahun dan tidak lama sesudahnya ia meninggalkan Vorstenlanden tanpa izin dari paman nya mangkunegara VI dan selama pelariannya kira-kira empat tahun ia bekerja sebagai pegawai gubernemen rendahan di Demak. Selama ia Demak terus belajar sendiri memusatkan studinya dalam bahasa Belanda dan kesusastraan Jawa. Kehadirannya di Demak berakhir pada tahun 1906 karena suatu insiden yang meyebabkannya berkonflik dengan bupati dan mendapat kecaman dari pemerintah di Batavia (George D. Larson, 1990: 90).

Perubahan besar dalam hidupnya datang lima tahun kemudian (1911), ketika Residen Van Wijk, sudah mengatasi kesulitan dengan para pembesar Batavia berhubung dengan peristiwa Demak, berhasil melangsungkan pengangkatannya sebagai penerjemah pribumi di Surakarta. Selama masa kerjanya sebagai penerjemah ia muncul untuk pertamakalinya dikalangan masyarakat umum, sebagai tokoh terkemuka dalam Organisasi Budi Utomo cabang Solo, yaitu salah satu cabang yang pengurusannya terbaik di pulau Jawa. Ia juga tampil sebagai salah seorang penyumbang karangan yang paling dihargai dalam surat kabar Darmo Kondo. Pada tahun 1913 Soerjosoeparto mengajukan permohonan cuti dan berangkat ke Belanda untuk belajar, mgisi kekurangan dalam pengetahuannya. Tahun pertama ia belajar pada universitas Leiden di fakultas kesusastraan Timur, didalam masa pembelajaran

ia bertemu dan berkenalan baik dengan putra Pangeran Notodirojo, RM Noto Soeroto, yang sedang belajar hukum di Liden.

Dalam bulan Mei 1914 pada akhir tahun pelajaran, ia memutuskan untuk mengabungkan diri dengan resimen genedir cadangan dan tidak lama kemudian dinaikan sebagai koprал cadangan. Bahkan ketika ia naik pangkat lagi, ia masih terus dikenal dalam resimennya sebagai "koprал Kecil". Sesudah pecah Perang Dunia I dalam bulan Agustus 1914 unitnya dimobilisasi dan Raden Mas Sueryo Soeparto putra besama Noto Soeroto menjadi satu-satunya orang Jawa yang berdinastidalam tentara Belanda. Ia dikirim ke sekolah opsir cadangan di Amersfoort dan dinaikkan pangkat sebagai letnan-dua cadangan dalam bulan Mei 1915. Pada akhir bulan itu ia diberi cuti dan berkenan diterima oleh Ratu Belanda, dan diberi izin untuk pulang kembali ke Jawa. Ketika tiba di Surakarta dalam bulan Juni 1915, Raden Mas Sueryo Soeparto tak lagi bekerja sebagai penerjemah pribumi, tetapi diberi kedudukan yang lebih bertanggung jawab sebagai ajun kontelir untuk urusan agraria di tempat Residen Sollewijn Gelpke (1914-1918) dari situlah mendapat dapat penilaian tentang kemampuannya sebelum memutuskan apakah ia dapat atau tidak direkomendasikan mengganti Mangkunegaran VI yang ingin turun takhta. Ia meneruskan apa yang ditinggalkannya dulu dan giat kembali dalam kehidupan sosial serta tampil sebagai politikus kelas utama (George D. Larson, 1990: 92)

Pada bulan Februari 1916, sebulan sesudah Mangkunegara VI turun takhta dan pindah kediamannya ke Surabaya, Gubernur Jendral Indenburg menunjuk dan mengangkatnya Soerjosoeparto sebagai kepala keluarga Mangkunegaran yang baru, dengan syarat bahwa ia mengundurkan diri dari Budi Utomo dan berhenti dari jabatannya dalam tentara cadangan Belanda. Pada tanggal 15 Februari ia menandatangani perjanjian yang memberi kekuasaan yang luas kepada residen, dan pada tanggal 3 Maret 1916 ia resmi menjadi kepala kerajaan Mangkunegaran dengan nama dan gelar Pangeran Adipati Ario Parabu Parangwedono (Komandan Militer), yaitu gelar yang di pakai oleh pemegang tahta Mangkunegaran yang pada saat dinobatkan belum mencapai usia 40 tahun, setelah remi menjadi Mangkunegara VII pada Tahun 1924, ia juga di beri pangkat letnan kolonel dalam dinas Ggubermen

Hindia Belanda dan diangkat sebagai Komandan Legium (George D. Larson, 1990: 98).

Pada masa pemerintahan Mangkunegara VII, istana Mangkunegaran banyak mengalami kemajuan, baik didalam bidang politik, sosial ekonomi, maupun sosial budaya. Kemajuan yang diperoleh pemerintah Mangkunegaran tersebut tidak lepas dari peranan Mangkunegara VII sebagai pemegang tahta kadipaten mangkunegaran. Kedudukannya sebagai kepala pemerintahan mangkunegaran menempatkannya sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan tertinggi di istana Mangkunegaran. Dengan kekuasaan yang dimilikinya ini, memberikan kemungkinan bagi mangkunegara VII untuk berbuat lebih banyak dalam mengatur rumah tangga paraja mangkunegaran. Sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Hindia Belanda, maka Pemerintahan Mangkunegaran sebagian besar menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh pemerintah pusat (Batavia). Oleh karena pada tahun 1900-1942, pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik kolonial etis yang bertumpu pada Edukasi (pendidikan), Irigasi (pengairan), dan emigrasi (perpindahan penduduk), maka pemerintah Mangkunegaran juga akan terpengaruh dengan kebijaksanaan yang sama. Hanya saja karena pemerintah memiliki otonomi yang luas untuk mengatur pemerintahannya sendiri, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan pusat itu diterjemahkan sendiri oleh pemerintah Praja Mangkunegaran (Wasino, 1996:4).

Berbeda dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan di Kasunanan Surakarta, kebijaksanaan yang dijalankan di Mangkunegaran memiliki perbedaan yang sangat kontras, baik dalam orientasi ekonomi, politik, budaya maupun sosial. Bahkan kebijakan politik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial cenderung berpihak pada penguasa mangkunegaran dari pada Kasunanan. Lembaga-lembaga kolonial, baik benteng, kantor pemerintahan, rumah pejabat, aktifitas perekonomian maupun dalam pengadaan lembaga pendidikan lebih terpusat di Mangkunegaran (kampong lor). Sedangkan untuk kampong kidul (Kasunanan) lebih menekankan Islam sebagai basis politiknya, dalam pelaksanaannya politik Islam yang dilaksanakan kasunanan tersebut bertujuan untuk membangun legitimasi kraton yang telah lama memudar dan pada sisi lain merupakan suatu simbol dari perlawanan. Bentuk politik Islam yang dijalankan oleh pemerintahan kasunanan tampak dalam hal pengadaan-pengadaan

lembaga pendidikan, alasan yang dikemukakan sunan adalah: 1). Pendirian lembaga pendidikan Islam dapat membuka celah-celah penyelesaian perbedaan sosial dan kesenjangan antar kelompok sosial; 2). Berdirinya lembaga pendidikan Islam akan membentuk solidaritas dan mengerakkan potensi kampung kidul; 3). Pendidikan ketrampilan memacu penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat yang tidak memungkinkan memasuki pendidikan formal (Hermanu Joebagio, 2010:65).

Pada masa pelaksanaan politik etis, Raja yang memerintah di Mangkunegaran adalah mangkunegara VI (1896-1916) dan Mangkunegara VII (1916-1942). Dua penguasa ini pernah mengenyam pendidikan formal Eropa, bahkan Mangkunegara VII pernah belajar kenegeri Belanda pada masa mudanya. Itulah sebabnya parapenguasa ini, terutama mangkunegara VII sangat progresif dalam memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya agar tidak ketinggalan zaman. Hal itu antara lain dijalankan dengan memberi prioritas utama kepada pembangunan-pembangunan infrastruktur dan pembangunan dunia pendidikan. Pada masa pemerintahannya, Mangkunegara VII banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik itu formal ataupun non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang di selenggarakan di sekolah-sekolah secara teratur, sistematis dan mempunyai jenjang serta waktu yang telah ditentukan, sedangkan pendidikan non formal adalah sesuatu bentuk pendidikan yang di selenggarakan secara tertib, terarah dan berencana yang berlangsung di luar sekolah (Zahara Indris, 1981: 12).

Dalam penyelenggaraan pendidikan formal, Magkunegaran sudah menguasai pendirian sekolah sejak masa pemerintahan mangkunegara VI. Sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah siswo mangkunegara dan sekolah Siswo Rini. Sekolah siswo magkunegaran adalah sekolah pertama milik mangkunegaran, yang didirikan pada tahun 1912 , lokasinya adalah di depan istana mangkunegaran menghadap ke timur. Sekolah ini merupakan sekolah nomor satu, tetapi dua tahun kemudian 1914 , sekolah ini di jadikan HIS nomor IV di Surakarta (Amin Singgi, 1994 :2 ). Untuk pelaksanaan belajar mengajar pada sekolah siswo ini dilakukan pada pagi hingga siang hari, yang dimulai pada jam 07.30 sampai jam 13.00 WIB, dengan materi yang diajarkan adalah bahasa Jawa, Ilmu bumi, berhitung dan bahasa

Melayu sedangkan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Untuk peyediaan tenaga pendidik, adalah mereka yang memiliki ijazah Hoogere Kwekschool, yaitu lulusan sekolah pedidikan guru yang satu tingkat lebih tinggi dari Kweekschool.

Pada sekolah siswo Magkunegaran ini perekrutan murid dilakukan hanya pada mereka anak-anak dari pegawai pamong praja Mangkunegaran, anak-anak legium mangkunegaran dan anak-anak priyayi. Sedangkan untuk anak-anak dari kalangan rakyat jelata mereka boleh masuk apabila ada sisa bangku yang kosong. Untuk sarana dan prasarana penunjang sekolah seluruhnya ditanggung oleh pemerintah praja Mangkunegaran. Mengenai sarana dan prasarana tersebut sekolah meyediakan buku-buku pelajaran yang sama dengan yang digunakan oleh HIS pemerintah Belanda. Akantetapi, meskipun sarana dan prasarana sekolah ditanggung oleh pemerintah Mangkunegaran, kepada para murid tetap dipunggut bayaran sekolah. Besarnya uang sekolah tidaklah sama antara murid yang satu dengan murid yang lain.

Selain sekolah Siswo, Mangkunegaran juga mendirikan sekolah Siswo Rini yaitu sekolah yang diselenggarakan pemerintah mangkunegaran untuk kaum wanita yang berlokasi di depan pintu gerbang timur istana Mangkunegaran. Pendirian sekolah ini didasarkan atas pertimbangan akan pentingnya keduduka serta tanggung jawab wanita dalam rumah tangga. Wanita diharapkan mampu menjadi teman sekerja bagi laki-laki dalam keluarga, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh seta mendidik anak-anak sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, orang tua, bangsa dan Negara, terlebih lagi kepada Tuhan. Dalam pelaksanaannya sekolah ini ditangani langsung oleh pemerintah paraja Mangkunegaran yang bertugas mengadakan pemeriksaan terhadap perkembangan sekolah ini pada setiap tahun.

Dalam penyampaian materi pelajaran, sekolah siswo Rini hanya masuk lima kali dalam satu minggu dan proses belajar mengajarnya dilaksanakan mulai jam 07.30, sampai 12.30. Sekolah ini terdiri dari 7 kelas dan yang berhak menentukan kelas-kelas ini adalah kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah sendiri dalam pengangkatannya di tentukan oleh kepala Mangkunegaran dengan persetujuan Residen Surakarta (wawancara dengan K.R..T. Sumarso Ponco Sucitro, pada tanggal

4 desember 2010). Seperti halnya sekolah siswo, dalam penerimaan murid di sekolah siswo Rini ini yang diutamakan hanyalah anak-anak dari kalangan pegawai dan abdi dalem istana Mangkunegaran saja sedangkan untuk anak-anak rakya biasa mereka boleh masuk apa bila sekolah ini mengalami kekurangan murid utama.

Pada masa pemerintahan Mangkunegara VII, kedua sekolah yang didirikan pada masa Mangkunegara VI tersebut tetap dipelihara dan dikembangkan. Dalam perekrutan tenaga pengajar nya Mangkunegara VII lebih mengutamakan pada tenaga-tenaga pengajar dari kalangan Praja mangkunegaran sendiri. Sedangkan untuk sistem pengajarannya tidak jauh berbeda dengan sistem pengajaran yang dijalankan pada pemerintahan Mangkunegara VI, hal tersebut terjadi karena sistem pengajaran pada sekolah-sekolah tersebut mengacu pada sekolah-sekolah yang di selenggarakan oleh pemerintah Belanda. Adapun usaha-usaha Mangkunegara VII dalam peningkatan pendidikan formal selain meningkatkan dan mengembangkan sekolah-sekolah yang sudah ada di Mangkunegaran yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Beliau juga mengusahakan didirikannya sekolah-sekolah desa dan sekolah MULO pribumi yang disebut MULO School Mangkunegaran. Untuk sekolah-sekolah desa Mangkunegara VII mendirikan nya pada tahun 1918 dengan jumlah delapan belas buah, sedangkan untuk biaya-pengadaan delapan belas sekolah desa di Magkunegaran tersebut di tanggung oleh pemerintah mangkunegaran sendiri, yang meliputi pembangunan gedung sekolah, pengadaan buku-buku dan alat tulis, perlengkapan kelas, gaji guru dan kepala sekolah. Akan tetapi untuk pengadaan dan penambahan jumlah sekolah desa selanjutnya, pemerintah Mangkunegaran menginginkan adanya bantuan dari desa-desa untuk meyediakan gedung-gedung sekolah, sedangkan untuk biaya yang lain tetap ditanggung oleh pemerintah magkunegaran sendiri. Kebijakan ini di tempuh semata-mata karena keinginan Mangkunegara VII untuk secepat mungkin menambah jumlah sekolah desa sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah mangkunegaran.

Selain dalam bidang pengadaan sekolah-sekolah bagi praja-praja mangkunegaran, mangkunegara VII juga melakukan usaha pemberian beasiswa bagi praja Mangkunegaran yang sedang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang diadakan oleh Mangkunegaran. Usaha pemberian beasiswa Mangkunegaran adalah

suatu bentuk usaha bantuan keuangan yang diberikan kepada anak-anak pegawai pemerintah Mangkunegara yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun orang tua nya tidak mampu. Mengenai pemberian beasiswa ini diatur dalam Rijktsblad tahun 1917, nomor 20, yang isinya sebagai berikut:

perpustakaan  
Kang kena kapirangan pitulungan dhuwit kanggo waragad sinau iku: [www.perpustakaan.uns.ac.id](http://www.perpustakaan.uns.ac.id)  
ha. Putra sentana ing Mangkunegaran kang manggon ing bawah Mangkunegaran.  
na. putra sentana ing mangkunegaran kang kaparingan balanja saka paparentah Mangkunegaran kang ora manggon ing bawah Mangkunegaran, nagging isih ana ing sajeroning Paresidenan Surakarta.  
ca. priyayi lan opsir ing Mangkunegaran, kang isih tetep utawa kang wus kaparingan lereh kalayan .

Dari penulisan di atas diartikan sebagai berikut:

Yang mendapatkan beasiswa Magkunegaran adalah:

1. Anak pegawai yang tinggal di wilayah Magkunegaran.
2. Anak pegawai praja yang tidak tinggal di wilayah Mangkunegaran, tetapi masih dalam wilayah karesidenan Surakarta.
3. Priyayi dan opsir Magkunegaran yang masih aktif maupun yang sudah pension.

Pada dasarnya badan untuk urusan beasiswa ini sudah didirikan pada masa pemerintahan Mangkunegara VI atas kerja sama kepala pemerintah Mangkunegaran yaitu Mangkunegara VI dengan residen Surakarta, yang pada saat itu dijabat oleh G.F. Van Wijk tahun 1912. Kemudian pada tahun 1913 dibuat suatu peraturan mengenai pemberian beasiswa yaitu pada tanggal 15 oktober 1913, no 11/Q, dan dimasukkan dalam Rijktsblad no.20 tahun 1917. Didalam pemberian keputusan beasiswa atau studifon Mangkunegara VII dibantu oleh suatu badan penasehat tersendiri, dari bupati patih sebagai ketua, supperintendent, dan mayor legium. Tenbusan surat keputusan pemberian beasiswa disampaikan kepada orangtua murid yang bersangkutan.

Pada awalnya besarnya beasiswa disesuaikan dengan penghasilan orang tua perbulan namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kesulitan sehingga pada tahun 1919 terjadi perubahan pada pemberian beasiswa. Dalam pemberiaan beasiswa didasarkan pada jenis dan bidang pendidikan tanpa memperhitungkan penghasilan orang tua. Selanjutnya bagi anak-anak yang menerima batuan beasiswa dari

pemerintah Magkunegaran setelah mereka menyelesaikan pendidikannya dan mulai bekerja mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut dalam pengembalian uang datur dalam Rijkblad no 20 tahun 1917, pada bab V yaitu:

Sawiji-wijine bocah sawuse mari nampani pitulungan waragad saka parentah, bakal kapingan layang paratelan pariciane pitulungan waragad mau tanpa kapetung anakane, sarta kudu tumuli nagturake bali dhuwit pitulungan saka parentah mau...(rijkblad, 1917, h.143).

Dari kata-kata di atas bila diartikan secara bebas, dapat diperoleh suatu pengertian sebagai berikut:

Bagi setiap anak yang telah memperoleh bantuan beasiswa dari pemerintah, akan mendapatka surat yang berisi rician mengenai beasiswa yang sudah diberikan tanpa dihitung bunganya, dan kepada mereka diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut.

Jadi meskipun bantuan ini disebut sebagai beasiswa, dalam keyataannya hanya merupakan pinjaman dari pemeritah saja. Namun begitu tidak semua penerima beasiswa ini mengembalikan uang tersebut adapun cara pengembaliannya adalah denga cicilan tiap bulan sebesar 20% dari penghasilan perbulan, apabila penghasilan lebih dari f 50,- per bulan. Tetapi ada kemungkinan cicilan lebih kecil lagi. Hal ini terjadi apabila penerima beasiswa mengajukan keberatan. Bagi yang kemudian bekerja pada pemerintah Magkunegaran, paling sedikit harus mengembalikan 5% dari pengasilannya. Dari tahun 1912 – 1923 Mangkunegara telah mengeluarkan beasiswa atau stdiefonds sebesar f 162.078,71 ( Djawa, 1924).

Selain dalam bidang peyedianan sekolah-sekolah dan pemberian beasiswa atau stdiefonds, Mangkunegara VII juga pendidikan non formal. Dalam peyediaan pendidikan non formal Mangkunegara VII lebih banyak bergerak dalam kegiatan-kegiatan pemuda. Sehingga pada masa pemerintah Mangkunegara VII banyak sekali didirikan organisasi-organisasi pemuda, diantaranya adalah Javaansche Padvinders Onrganisatie (JPO) yang didirikan pada tahun 1917, Kirado mudo yang didirikan pada tahun 1934 dan Mulat Sarira. Didirikannya organisasi-organisasi ini pada dasarnya adalah untuk menampung para pemuda khususnya yang berada diwilayah Mangkunegaran, agar mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemuda. Hal ini dipandang perlu karena dengan dilaksanakan nya kegiatan tersebut akan dapat



mendatangkan keuntungan bagi para pemuda itu sendiri. Selain melalui pendirian organisasi-organisasi ini, dalam pendidikan non formal, pemerintah mangkunegaran juga mengusahakan adanya pendidikan pemberantasan buta huruf untuk seluruh rakyat Mangkunegaran. Usaha pemberantasan buta huruf ini dilakukan Mangkunegara VII atas pertimbangan masih banyaknya kawula Mangkunegaran yang tidak biasa membaca dan menulis.

Pemberantasan buta huruf dikerjakan menurut rencana yang telah ditentukan dalam sistem pendidikan menurut Mangkunegaran. Pada waktu itu diadakan panitia istimewa yang menyusun bagian keuangan, guru bantu yang diberi tugas untuk memimpin pemberantasan buta huruf. Pemberantasan buta huruf umumnya diikuti oleh rakyat biasa sedangkan bagian yang mengurus dan menguasai tatalaksana pemberantasan buta huruf tersebut diserahkan kepada kalangan Pangreh Praja. Karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pangreh Pradja dan panitia yang dibantu oleh kaum guru Mangkunegaran sehingga jumlah murid yang mengikuti program Pemberantasan buta huruf ini bertambah dengan pesat, sehingga pada tahun 1942 terdapat sekitar 510 buah untuk seluruh wilayah di mangkunegaran, dengan jumlah siswa 9064 orang sehingga kursus untuk pemberantasan buta huruf ini makin menunjukkan eksistensinya (Amien Singgih, 1994:2).

### **C. Pendidikan Wanita Van Deventer Pada Masa Mangkunegara VII**

Seperti yang telah dijelaskan pada rumusan masalah sebelumnya didalam pengembangan pendidikan di daerah praja Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegara VI dan Mangkunegara VII telah banyak mendirikan sekolah-sekolah guna kepentingan dan kemajuan rakyat dikawasan Mangkunegaran. Dalam pengadaan pendidikan di kawasan Mangkunegara tersebut, Mangkunegara VII tidak hanya menyediakan sekolah-sekolah bagi golongan laki-laki saja, akan tetapi beliau juga menyediakan dan mengembangkan pendidikan bagi golongan wanita. Segera setelah beliau naik tahata maka nasib wanita-wanita yang ada di Magkunegaran segera mendapat sedikit titik terang yaitu dengan diadakannya suatu aturan tentang batas umur minimal bagi wanita untuk diperkeanankan memasuki masa perkawinan (semacam undang undang perkawinan). Dengan demikian terjadi perlindungan secara

hukum terhadap wanita di Magkunegaran dan sekaligus menghindari perkawinan anak-anak yang terjadi sebagai salah satu kebiasaan orang Jawa pada saat itu. Dalam undang-undang yang dibuat oleh Mangkunegara tersebut berisi tentang batas rendah bagi usia anak perempuan untuk dapat diizinkan melansungkan perkawinan, hal tersebut dilakukan oleh Mangkunegara VII dengan tujuan melindungi generasi muda dari perkawinan sebelum badan dan pikiran cukup matang untuk menerima kewajiban selaku ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anak yang harus mereka asuh dengan baik (Himalayah Darmawan, 1993:12).

Dalam taradisi Jawa menetapkan bahwa setelah menikah, seorang wanita harus memutuskan semua ikatan pribadi dengan kehidupan sebelumnya, karena ikatan emosional pada masa kanak-kanak karena ikatan tersebut dapat membebani pengabdian cinta kepada suami mereka. Wanita yang sudah menikah dipaksa mengakiri semua hubungan formal dengan masa lalu, hal tersebut juga meyiratkan bahwa para wanita Jawa dipaksa harus melupakan riwayat pribadi yang meliputi pendidikan Barat yang dianggap mahal dan canggih (Frances gouda, 2007:185).

Selain di keluarkannya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan bagi wanita di Mangkunegaran, Usaha-Usaha lain yang dilakukan oleh Mangkunegara VII dalam mempertinggi kedudukan wanita adalah dengan jalan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi kaum perempuan, dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi kaum wanita, Mangkunegara VII tidak hanya melanjutkan dan mengembangkan sekolah-sekolah wanita yang telah ada pada masa pemerintahan sebelumnya tetapi ia juga membangun gedung-gedung sekolah baru guna menjang dan meningkatkan pendidikan yang telah ada pada masa pemerintahan Mangkunegara VI. Selain dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh praja Mangkunegaran sendiri, di Mangkunegaran juga didirikan sekolah-sekolah swasta. Dalam pendirian sekolah-sekolah swasta ini Praja mangkunegaran, melalui mangkunegara VII banyak membantu dan mendukung pendirian dan pengembangan sekolah-sekolah tersebut. Berbeda dengan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang lainnya seperti: birokrasi, dan pengatuaran keungan, pembaharuan dalam bidang pendidikan secara politis tidak banyak mengalami pencekalan dari pemerintah Hindia Belanda. Walaupun pada dasarnya segala kebijakan pemerintah Mangkunegaran dan

pelaksanaannya dalam lapangan tidak bebas dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda, yang mungkin akan mengawatirkan status quonya di wilayah Hindia Belanda (Wasino, 1996 : 23).

Salah satu bentuk perhatian mangkunegara dalam bidang pendidikan swasta adalah dengan didirikannya sekolah gadis Solosche Van Deventer Vereeniging lingkungan Mangkunegaran Surakarta. Sekolah tersebut merupakan sekolah menengah putri milik swasta dibawah naungan yayasan Van Deventer Fonds yang berpusat di Nederlands. Sekolah ini dapat berdiri karena mendapat bantuan keuangan dari praja Mangkunegaran, demikian pula dalam penyelenggaraan pendidikan setiap tahunnya juga masih mendapat bantuan dari praja Mangkunegaran (Wasino, 1996:27). Gagasan awal didirikannya sekolah ini di mulai pada masa Pangeran Adipati Harya Mangkunegara ke VII pada tahun 1925. Guna merealisasikan gagasan tersebut maka dicarilah tanah atau bangunan yang mampu menjadi sekolah dan asrama dalam menyampaikan pendidikan, yang kemudian dipilihlah *dalem* (rumah) dari pangeran Natadiningrat yang dibangun sejak awal 1917. Setelah muncul suatu kesepakatan dan disetujui oleh mangkunegara VII maka kompleks dalem Pangeran Natadiningrat di beli oleh Yayasan Van Deventer seharga FL 20.000 (dua puluh ribu ulden). Akhirnya sekolah Van Deventer di Mangkunegaran diresmikan tepat pada tanggal 1 juli 1927, setelah diresmikannya sekolah tersebut kompleks dalem pangeran Notoningratan dibalik namakan atas nama Yayasan Van Deventer pada tanggal 12 Maret 1927. Sekolah Van Deventer sendiri merupakan sekolah menengah untuk ketarampilan Wanita sebelum mereka Masuk kejenjang pernikahan dan kehidupan keluarga. Pada proses pendirian sekolah ini didasarkan atas perhatian Mangkunegara VII dalam peningkatan nasib gadis-gadis dikalangan Mangkunegaran, serta perlunya pendidikan bagi gadis-gadis supaya mereka lebih pandai dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam sebuah keluarga.

Selain alasan-alasan diatas, sebab lain didirikan nya sekolah ini oleh Mangkunegara VII adalah untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa dari Mr. Van Deventer, tokoh Politik Etis Belanda yang telah meninggal . Mr Van Deventer sendiri adalah teman baik Mangkunegara VII pada saat beliau sedang bersekolah di negeri Belanda tahun 1913-1915, Mr. Van Deventer juga datang pada saat penobatan Raden

Mas Ario Suryo Suparto menjadi Raja Keraton Mangkunegara di Solo, dalam *Triwindoe-Gedenkboek* (Buku Kenangan Triwindu) Van Deventer menyatakan kekagumannya atas pesona tanah Jawa, ia juga mengatakan bahwa, ia merasa senang biasa bersahabat dengan Raden Mas Ario Suryo Suparto atau Mangkunegara VII (Frances gouda, 2007 :174). Salah satu bukti pengukuhan persahabatan mereka adalah dengan didirikannya Sekolah Van Deventer di Mangkunegaran yang kemudian mendapat dukungan dari Gusti Kanjeng Ratu Timoer istri dari Mangkunegara VII. Para murid sekolah Van Deventer berasal dari daerah-daerah yang jauh dari luar Mangkunegaran, mereka rata-rata berasal dari daerah Jawa Barat dan Jawa timur, bahkan ada juga murid yang berasal dari wilayah luar pulau Jawa (Bali). Seperti halnya sekolah-sekolah lain yang ada di daerah Mangkunegaran, dalam penerimaan murid sekolah Van Deventer lebih mengutamakan putrid-putri dari kalangan pejabat tinggi dikalangan karaton maupun di luar kraton sedangkan untuk murid dari golongan rakyat jelata mereka boleh masuk apabila terdapat sisa tempat di ruangan kelas. Selain dari kalangan pejabat dan kalangan sentono dalem sekolah Van Deventer juga menampung murid dari lulusan sekolah dasar, sekolah *Kartini School*, *Europese Lagere School* (ELS) atau *Holiands Inlandse School* (HIS) (Sri Wahyuni, <http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload/file/66-fullteks.doc>. 12 April 2010, 14:04:27).

Pada tahun 1927 jumlah murid yang masuk sekolah Van Deventer ini adalah 24 siswi, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 1936 menjadi 79 siswi dan tahun 1938 menjadi 100 siswi dengan rincian kelas 1e. 39 siswa, 2e. 28 siswa, 3e. 16 siswa dan 4e. 17 siswa (Verslag,1937-1938: 5). Dalam penyampaian materi pelajaran, sekolah Van Deventer hanya masuk lima kali dalam satu minggu dan proses belajar mengajarnya dilaksanakan mulai jam 07.30, sampai 12.30 dengan dua kali istirahat selama 15 menit (wawancara dengan K.R..T. Sumarso Ponco Sucitro, pada tanggal 4 desember 2010). Materi Pelajaran yang diberikan di Van Deventer School pada dasarnya sama dengan materi yang diberikan di sekolah Siswa Rini yaitu pelajaran kusus kerumah tanggaan, seperti memasak, mengurus keuangan rumah tangga, kesehatan, menjahit, selain itu juga terdapat materi pelajaran umum seperti berhitung, membaca dan menulis, hanya saja terdapat tambahan pelajaran seperti

menyayi, menari dan krawitan. Kurikulum yang lengkap dan materi pelajaran yang berbeda dengan dengan sekolah bagi wanita-wanita di mangkunegaran menjadikan sekolah Van Deventer ini sebagai pusat pendidikan wanita yang paling diminati bagi gadis-gadis di Jawa pada saat itu . Sekolah Van Deventer memang memiliki kualitas yang lebih jika dibandingkan dengan sekolah siswo Rini milik Mangkunegaran yang dibangun pada masa pemerintahan Mangkunegaran VI. Selain kurikulumnya yang lengkap, sekolah ini juga mendapat perhatian khusus dari Mangkunegara VII. Selain didanai dari yayasan Van Deventer yang berada di Netherlan sendiri, dalam pelaksanaannya sekolah ini juga mendapat bantuan dari Praja Mangkunegaran, hal tersebut di wujudkan dengan diberikannya dana bantuan dalam penyelenggaraan sekolah sebesar f 300 dan f 384 perbulan guna menunjang pelaksanaan pembelajaran di sekolah Van Deventer yang berada di lingkungan kraton Mangkunegaran ini (Verslag, 1938:6)

Bentuk perhatian Mangkunegara VII dalam pendirian sekolah ini adalah dengan diberikan nya fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan kepada sekolah Van Deventer, fasilitas-fasilitas tersebut tidak diberikan kepada sekolah-sekolah wanita lain yang ada di kawasan Mangkunegaran termasuk Siswa Rini sekolah wanita yang didirikan pada masa Mangkunegara VI yang kemudian dikembangkan pada Masa Mangkunegara VII. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi, diperkenankan nya murid-murid sekolah Van Deventer untuk menggunakan pendopo Agung Mangkunegaran beserta gamelannya selama satu kali seminggu, hal tersebut di lakukan guna menunjang matapelajaran menari, menyayi dan krawitan Jawa, dimana sering sekali Gusti Kanjeng Ratu Timur permausuri dari Mangkunegara VII sendiri yang langsung memberikan contoh-contoh pelajaran kepada para murid yang berjumlah 79-100 orang. Dengan kasih sayang bak seorang ibu yang mengasuh anaknya, Gusti Kanjeng Ratu Timur dengan sabar beliau mengajarkan gerakan-gerakan tari Jawa yang lemah gemulai, bahkan dicontoh kannya pula bagai mana cara berlaku *dodok* (berjalan jongkok) (Himalayah Darmawan, 1993:14). Selain perhatian dari Gusti Kanjeng Ratu Timur, pada saat-saat tertentu Mangkunegara VII meyempatkan diri melihat latihan-latihan yang dilakukan murid-murid Van Deventer School di pendopo agung dan langsung memberikan kritik dan petunjuk serta

memerintahkan seorang penari yang lebih ahli dan senior untuk memberikan contoh kepada murid-murid yang sedang belajar, selain itu beliau juga secara pribadi memberikan teori-teori dan teknik-tekniknya bagai mana menari yang benar, dengan harapan agar para siswi Van Deventer School benar-benar memahami dasar-dasar tari Jawa yang kemudian dapat mereka kembangkan sendiri.

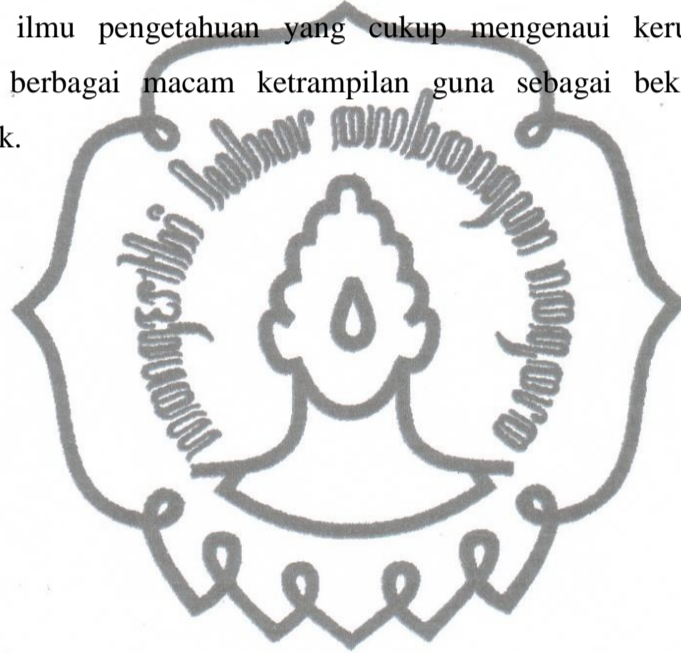
Selain diperbolehkan menggunakan pendopo agung untuk menunjang materi yang di berikan di sekolah tersebut, empat kali dalam satu minggu para murid Van Deventer school juga diperkenankan menggunakan kolam renang, lapangan tenis dan lapangan olah raga lain di dalam istana Mangkunegaran, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar supaya didapat generasi wanita yang sehat, kuat, tampil dan pandai. Agar tidak menjadi asing dilingkungan adat Jawa maka pada sekolah yang didirikan sejak tahun 1927 ini selalu diberikan pelajaran etiket dan adat Jawa untuk dapat membentuk watak ketimuran bagi kaum wanita yang telah menikmati pengetahuan Barat dan hal ini juga dilakukan istana dan keluarga Mangkunegaran.

Dalam kesulitan yang dihadapi sekolah Van Deventer ini Mangkunegara VII beserta Gusti Kanjeng Ratu Timur selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuannya sehingga sekolah Van Deventer nenajak namanya menjadi sekolah favorit bagi kaum wanita yang belum dapat melanjutkan sekolahnya ketingkat yang lebih tinggi. Selain itu sekolah Van Deventer juga dianggap sebagai sekolah yang menentukan karakter bagi wanita Jawa untuk dapat dipersiapkan dalam masyarakat nanti, hal tersebut terbukti dalam tindakan Pangeran Adipati Harya Mangkunegara VII yang menunjuk putrinya yang ke dua Raden Ajeng Partinah yang telah selesai menjalani study di AMS jogja, untuk kembali mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah Van Deventer selama dua tahun, dengan tujuan agar dapat mengawinkan antara pengetahuan teori dengan pengetahuan praktek, ditambah dengan ilmu pendidikan dan Ilmu kerumahtanggaan (Bernadinah Himalayah, 1985: 49).

Selain dalam penyediaan gedung dan tempat yang mendukung dalam penyampaian materi di sekolah keputrian Van Deventer, Mangkunegara VII juga menyediakan beasiswa bagi wanita-wanita putri kerabat Mangkunegaran yang mampu melalui studi fonds Mangkunegara VII, selain untuk sekolah Van Deventer School pemberian studi fonds juga diberikan kepada gadis-gadis yang masuk sekolah MULO

ataupun AMS Semarang dan sekolah guru kepandaian putri di Jakarta (Himalayah Darmawan, 1993:15). Pemberian beasiswa tersebut bertujuan agar supaya gadis-gadis Magkunegaran dapat menempuh pendidikan formal secara lebih luas.

Usaha-usaha yang dilakukan Mangkunegara VII tersebut didasarkan atas pertimbangan akan pentingnya kedudukan serta tanggung jawab wanita dalam rumah tangga. Wanita diharapkan menjadi teman sekerja laki-laki dalam keluarga, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh serta mendidik anak-anak hingga tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab pada diri sendiri, orang tua, bangsa dan negara, terlebih kepada Tuhan. Lebih dari itu, wanita dalam rumah tangga dituntut untuk menjadi terang yang dapat menampakkan cahayanya bagi seluruh keluarga. Segala kemampuan ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya bekal pendidikan yang cukup bagi kaum wanita. Untuk tujuan inilah maka pemerintahan Mangkunegaran, memperbolehkan dan membantu pendirian sekolah Van Deventer, di lingkungan Mangkunegaran Surakarta. Di sekolah ini para wanita dipersiapkan untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan segala tanggung jawabnya, dengan diberi bekal ilmu pengetahuan yang cukup mengenai kerumahtanggaan dan pengetahuan berbagai macam ketrampilan guna sebagai bekal setelah mereka menikah kelak.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai wanita dalam pendidikan kolonial (studi tentang sekolah Van Deventer di Mangkunegaran) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan kolonial Belanda merupakan suatu akibat langsung dari politik etis yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial yang ditandai dengan dimulainya sistem pendidikan formal Eropa. Dalam penyelenggaraannya mayoritas murid-murid yang bersekolah di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda tersebut adalah anak laki-laki, jarang sekali terdapat anak perempuan yang bersekolah kecuali anak *priyayi* dan bangsawan. Kesempatan bersekolah bagi perempuan pribumi semakin kecil karena sekolah-sekolah di Jawa dimaksudkan untuk mendidik pegawai pemerintahan. Konsekuensinya adalah yang pertama hanya anak laki-laki yang diterima dan kedua, anak *priyayi* diberikan prioritas utama. Maka anak-anak wanita mengalami berbagai rintangan dalam mengikuti pendidikan formal. Agama Islam dan agama mayoritas penduduk Jawa pada masa itu masih menentang pendidikan formal untuk gadis-gadis. Penduduk sendiri tidak melihat adanya manfaat gadis-gadis dididik dengan cara yang sama seperti anak pria. Gadis-gadis hanya memegang peranan penting dalam rumah tangga sehingga tidak perlu sekolah. Halangan-halangan sosial tersebut masih terlampau kuat untuk mengizinkan anak wanita menikmati pendidikan yang sama seperti anak laki-laki. Disamping itu semua sekolah menggunakan model pembahuran jenis kelamin, namun anak perempuan lebih jarang hadir karena keberatan para orang tua Jawa jika anak perempuan mereka satu kelas dengan anak laki-laki.
2. Setelah terbukanya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk bersekolah berpengaruh pada taraf kesejahteraan penduduk pribumi yang mengalami peningkatan melalui pendidikan. Dengan adanya pendidikan banyak memunculkan golongan-golongan intelektual yang nantinya menjadi motor



pergerakan bangsa menuju kearah masa depan yang lebih baik. Salah satunya adalah Adipati Mangkunegoro VII yang berjuang untuk menyejahterakan rakyat dengan cara mencerdaskan mereka melalui bidang pendidikan terutama pendidikan formal dengan mendirikan sekolah-sekolah dilingkungan Mangkunegaran. Tidak hanya mengusahakan sekolah-sekolah bagi laki-laki namun juga wanita. Selain mengusahakan sekolah-sekolah yang didirikan oleh kalangan istana mangkunegaran sendiri, Adipati mangkunegara VII juga mendukung pendirian sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, hal tersebut dilakukan guna mempercepat pembangunan pendidikan bagi masyarakat yang ada di sekitar Mangkunegaran.

3. Salah satu bentuk perhatian Mangkunegara VII dalam pendidikan wanita adalah dengan mendukung didirikanya sekolah Van Deventer di lingkungan Mangkunegaran. Sekolah ini didirikan pada tahun 1927, sekolah ini merupakan sekolah wanita milik swasta di bawah naungan yayasan Van Deventer yang berpusat di Nederlad, namun dalam peyelenggaraan nya sekolah Van Deventer ini mendapat bantuan langsung dari paraja Mangknegaran, selain itu sekolah ini juga mendapatkan perhatian kusus dari Mangkunegara VII dan istrinya Gusti Kanjeng Ratu Timoer. Seperti halnya sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Mangkunegaran, sekolah Van Deventer ini dalam merekrut murid-muritnya yang di utamakan adalah dari kalangan pejabat, atau sentono dalalem kraton sedangkan untuk rakyat jelata mereka boleh masuk apabila ada bangku yang kosong. Dalam pendirian sekolah ini bertujuan untuk mepertinggi kedudukan serta tanggung jawab wanita dalam rumah tangga di kalangan istana Mangkunegaran serta diharapkan wanita mampu menjadi teman sekerja laki-laki dalam keluarga, dengan cara memberikan bekal berupa bekal ilmu pengetahuan yang cukup mengenai kerumahtanggaan dan pengetahuan berbagai macam ketrampilan.

## **B. Implikasi**

### 1. Implikasi Teoritis

Pada masa pemerintahan Mangkunegaran VII, istana Mangkunegaran banyak mengalami kemajuan, baik dibidang politik, sosial ekonomi, maupun sosial budaya. Kemajuan yang diperoleh pemerintah Mangkunegaran tidak terlepas dari peranan Mangkunegoro VII sebagai pemegang tahta Kadipaten Mangkunegaran. Kedudukannya sebagai pemegang tahta kadipaten Mangkunegaran menempatkannya sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan tertinggi di istana Mangkunegaran. Untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya ditempuh melalui jalur pendidikan. Pendidikan bagi rakyatnya adalah merupakan bidang yang diprioritaskan di dalam kebijaksanaannya selaku kepala pemerintahan di Mangkunegaran.

### 2. Implikasi Praktis

Dengan adanya sekolah Van Deventer di Mangkunegaran, maka pusat pendidikan serta pelestarian budaya keraton bukan lagi berada di keraton melainkan di sekolah yang merupakan bagian institusi pelestarian budaya Jawa. Antusias para orang tua untuk menyekolahkan anaknya sangat besar, disamping itu kesadaran para orang tua untuk mengikutsertakan anak wanitanya untuk bersekolah sedikit demi sedikit merubah cara pandang masyarakat tentang peranan wanita yang sebelumnya wanita hanya memiliki peranan di rumah saja, bekerja disawah atau diperkebunan tetapi dengan adanya sekolah Van Deventer dilingkungan Mangkunegaran yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan wanita Jawa di lingkungan praja Magkunegaran tapi juga tidak meninggalkan tugas dan peranannya sebagai seorang istri kelak.

## **C. Saran**

### 1. Bagi para pembaca

Bagi para pembaca, terutama pendidik dan pelajar, penelitian ini diharapkan biasa menambah pengetahuan mengenai sejarah pendidikan yang ada di Indonesia terutama tentang sejarah wanita Jawa dalam pendidikan kolonial di Mangkunegaran. Selain itu,

dalam perkembangan perkembangan pendidikan sejarah, belum banyak materi yang membahas tentang pendidikan wanita sehingga dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu alternatif materi pelajaran yang di sampaikan kepada siswa.

## 2. Bagi mahasiswa

[perpustakaan.uns.ac.id](http://perpustakaan.uns.ac.id)

[digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id)

Bagi mahasiswa, diharapkan ada ketertarikan untuk meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai pendidikan wanita pada masa kolonial khususnya tentang sekolah Van Deventer di lingkungan Mangkunegaran dari berbagai sudut yang berbeda mengingat bahwa penelitian yang membahas mengenai wanita Jawa dalam pendidikan kolonial (studi sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta) masih terbatas. Pada umumnya yang sering dibahas tentang keberadaan pendidikan bagi kalangan pria saja.

